



**PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**  
**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**

**KEADILAN DALAM PRAKTEK:  
HAK ASASI MANUSIA DALAM ADMINISTRASI  
PENGADILAN**

**Laporan Tematik JSMP 1**

Dili, Timor Lorosa'e  
November 2001

Judicial Sistem Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor Lorosa'e. Melalui pemantauan terhadap pengadilan, penyediaan analisis hukum dan laporan tematik mengenai pmbangunan sistem peradilan, JSMP bertujuan memberikan kontribusi kepada evaluasi terus-menerus dan pembangunan sistem pengadilan di Timor Lorosa'e. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungilah website [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

*Judicial Sistem Monitoring Programme  
1/1a Rua do Mozambique, Farol, Dili  
Tel/Fax: (670) 390 323 883  
Mobile: (61) 419 366 404  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## CONTENTS

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>1</b>
<b>1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar-belakang .....	2
1.2 Metodologi .....	3
1.2.1 Judicial System Monitoring Programme .....	3
1.2.2 Kriteria-kriteria penilaian.....	4
1.2.3 Cakupan laporan.....	5
<b>2 ADMINISTRASI PENGADILAN.....</b>	<b>6</b>
2.1 Pentingnya administrasi pengadilan .....	6
2.2 Struktur administrasi Panel Khusus .....	7
2.2.1 Hakim-hakim sebagai administrator .....	8
2.2.2 Staff Registrasi dan pengadilan.....	9
<b>3 BIDANG-BIDANG KEPRIHATINAN KHUSUS .....</b>	<b>10</b>
3.1 Sumber daya yudisial.....	10
3.1.1 Fasilitas-fasilitas penelitian.....	10
3.1.2 Sumber daya material.....	11
3.1.3 Dukungan Administratif .....	12
3.1.4 Mobilisasi sumber-daya .....	12
3.2 Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tak wajar .....	13
3.2.1 Hubungan dengan pihak otoritas penjara dan CIVPOL .....	14
3.2.2 Manajemen Panel Khusus .....	16
3.3 Hak atas sidang dengar-pendapat umum .....	18
3.3.1 Akses publik ke persidangan.....	19
3.3.2 Akses ke informasi mengenai sidang-sidang pengadilan .....	19
3.3.3 Akses publik ke dokumen-dokumen pengadilan.....	20
3.3.4 Penerbitan keputusan pengadilan.....	21
3.4 Hak untuk memeriksa para saksi .....	23
3.5 Hak untuk menyatakan naik-banding .....	24
3.6 Hak atas seorang interpreter.....	27
3.6.1 Kebutuhan bahasa di dalam kasus-kasus Panel Khusus .....	27
3.6.2 Kekurangan interpreter/penterjemah.....	28
3.6.3 Dampak pada sidang pengadilan.....	29
3.6.4 Penterjemahan yang simultan .....	31
<b>4 SIMPULAN .....</b>	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN A.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN B.....</b>	<b>36</b>

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan ini mengkaji efektivitas administrasi Panel Khusus untuk Kejahatan Serious dari Pengadilan Distrik Dili yang dibentuk oleh Pemerintah Transisi PBB di Timor Lorosa'e (UNTAET). Panel Khusus ini diberi mandat untuk menangani Kejahatan-kejahatan Serious yang dilakukan selama pendudukan Indonesia, termasuk kampanye tindak kekerasan di tahun 1999. Kemampuan Panel ini untuk menegakkan keadilan secara adil dan independen sangat penting bagi proses rekonsiliasi yang tengah digalakkan. Dalam dua tahun terakhir, telah terjadi perkembangan yang sangat besar di dalam upaya membangun sistem peradilan yang memungkinkan hakim-hakim internasional dan Timor Lorosa'e bekerja bersama untuk mendengar berbagai kasus kejahatan serius. Secara konsisten JSMP telah memantau hampir setiap sidang dengar-pendapat di pengadilan yang digelar oleh Panel Khusus antara Februari dan November 2001. Melalui pengamatan-pengamatan ini dan diskusi dengan pegawai pengadilan, terang bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam sejumlah aspek di dalam susunan administratif sekarang, lembaga peradilan ini sedang mengefek secara berlawanan pada kualitas keadilan. Jika hal seperti ini tetap dibiarkan, hal-hal ini dapat mengancam pengadilan yang adil yang mesti dihasilkan Panel Khusus.

Administrasi peradilan yang berfungsi merupakan bagian dasar institusional hak dasariah untuk memperoleh pengadilan yang adil di depan suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tak memihak. Unsur-unsur khusus dari hak ini sekarang sedang mempengaruhi kurangnya suatu struktur administrasi efektif dalam Panel Khusus. Para hakim tidak memiliki sumber daya yang memadai, seperti fasilitas penelitian dan dukungan administrasi, yang sangat penting bagi kegiatan mereka. Hak ke peradilan tanpa penundaan yang tak wajar akan diruntuhkan oleh relasi administrasi yang tidak baik dengan pihak-pihak di luar sama halnya dengan perencanaan organisasi dalam menata berbagai kasus kejahatan serius. Hak untuk mengikuti sidang dengar-pendapat menjadi terbengkalai karena masalah akses, termasuk akses untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen pengadilan. Hak untuk memeriksa saksi dan untuk menyatakan naik-banding terhadap keputusan Panel Khusus terhambat oleh kekurangan sumber daya sehingga menghalangi pergantian terhadap biaya saksi dan transkripsi dengar-pendapat yang tidak dihasilkan. Jumlah interpreter dan penterjemah masih tidak cukup dibandingkan dengan keseringan dengar-pendapat dan pengadilan.

Kasus-kasus Kejahatan Serious bukanlah satu-satunya kasus yang dipengaruhi situasi sekarang. Keprihatinan ini juga memiliki implikasi yang lebih luas pada pembangunan sistem peradilan berkelanjutan yang mendapatkan kepercayaan dan keyakinan publik yang diperlukan suatu masyarakat yang berdasarkan pada hukum dan aturan serta hormat terhadap hak asasi manusia. Laporan ini merupakan laporan tematik pertama yang dikeluarkan JSMP dan dimaksudkan sebagai bahan perdebatan publik luas mengenai situasi sekarang dan arah masa depan sistem keadilan Timor Lorosa'e dengan mengajukan sejumlah rekomendasi untuk melakukan perubahan. Untuk merangkum rekomendasi-rekomendasi yang diketengahkan: perencanaan strategis yang komprehensif berdasarkan pada analisa kebutuhan yang lengkap harus merupakan suatu prioritas. Hal ini harus mengarah kepada perubahan substansial pada administrasi pengadilan, termasuk mobilisasi sumber-daya yang semakin meningkat secara signifikan dan pelatihan terkoordinir serta pemantauan terhadap staff Timor Lorosa'e. Ini menyimpulkan bahwa tanpa suatu struktur administrasi jelas, tanggung-jawab yang didefinisikan dengan benar dan pelatihan memadai serta dukungan teknis, sistem peradilan Timor Lorosa'e yang baru dan Panel Khusus untuk Kejahatan Serious akan tetap bergelut.

## 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar-belakang

Ketika Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor Lorosa'e (UNTAET) dibentuk pada 25 Oktober 1999 oleh Dewan Keamanan, UNTAET diberi mandat untuk "melaksanakan segala kekuasaan legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi peradilan."<sup>1</sup> Tugas yang dibebankan pada saat itu secara luas tidak diperdebatkan dan telah menjadi dokumentasi yang baik di dalam berbagai laporan<sup>2</sup>; gedung-gedung pengadilan dihancurkan, semua hakim dan sebagian besar pengacara meninggalkan wilayah ini dan tidak ada lagi penegakan hukum. UNTAET berupaya mendirikan empat Pengadilan Distrik, mengangkat sejumlah hakim Timor Lorosa'e, jaksa dan pembela umum serta meletakkan sistem hukum transisi yang tetap menerapkan hukum Indonesia sejauh tidak bertentangan dengan standar-standar internasional mengenai HAM dan tidak digantikan dengan peraturan UNTAET.<sup>3</sup> Terbentuknya suatu sistem hukum selama masa transisi dan meletakkan dasar bagi pengadilan masa depan Timor Lorosa'e merdeka tidak hanya menjadi suatu hal yang mendesak. Terdapat juga sejumlah kebutuhan mendesak akan keadilan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia, termasuk kampanye tindak kekerasan yang memporak-porandakan Timor Lorosa'e ketika militer Indonesia beserta kelompok-kelompok milisi menteror masyarakat sipil menjelang dan setelah jajak pendapat tahun 1999. Rekonsiliasi dan kepercayaan pada suatu sistem peradilan masa depan tergantung pada keadilan masa lalu.

Dengan demikian, pada bulan Juni 2000 UNTAET membentuk panel khusus Pengadilan Distrik Dili dan Pengadilan Tinggi guna menangani kasus-kasus *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan penyiksaan – kapan dan di mana saja dilakukan – demikian juga pembunuhan dan pelanggaran seksual lainnya sesuai dengan KUHP Indonesia yang dilakukan antara 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999.<sup>4</sup> Panel Khusus pertama mulai beroperasi Januari 2001 dan yang kedua pada November 2001. Setiap panel terdiri dari satu orang hakim Timor Lorosa'e dan dua orang hakim internasional. Selanjutnya, suatu cabang khusus Departemen Tuntutan Umum didirikan guna menyelidiki dan menuntut kejahatan-kejahatan serius. Pelayanan tuntutan umum kecil juga didirikan. Hingga kini, Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan lebih dari 30 keputusan kepada lebih dari 50 orang. 13 pengadilan kejahatan berat telah dilaksanakan, suatu prestasi berarti dalam ukuran tertentu. Pada bulan November 2001 dijatuhkan hukuman sebanyak 11 kasus, tidak ada pembebasan dan 2 kasus diberhentikan karena alasan-alasan prosedural atau yurisdiksi pra-peradilan. Pengadilan Tinggi telah mendengarkan dua pengajuan naik-banding terakhir dalam kasus kejahatan serius. Mengenai kasus-kasus yang telah disidangkan selama ini, semuanya, kecuali satu kasus, dijatuhi hukuman menurut KUHP Indonesia. Pengadilan pertama mengenai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, "kasus Lospalos" berlangsung antara Juli dan November 2001.

---

<sup>1</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272/99, pada 25 Oktober 1999.

<sup>2</sup> Lihat misalnya contoh laporan perkembangan Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Keamanan mengenai Pemerintahan Transisi Timor Lorosa'e, khususnya laporan pada 24 Juli 2001; Lihat juga Laporan Misi Dewan Keamanan ke Timor Lorosa'e dan Indonesia, 20 November 2000; Hansjoerg Strohmeyer "Building a New Judiciary for East Timor: Challenges of a Fledgling Nation" (2000) 11 *Criminal Law Forum*, 259-285; Suzannah Linton "Rising from the Ashes: the Creation of a Viable Criminal Justice Sistem in East Timor" (2001) 25 *Melbourne University Law Review* 122-180.

<sup>3</sup> Peraturan UNTAET 1999/1 seksi 3.

<sup>4</sup> Peraturan UNTAET 2000/15 sub-seksi 2.1, 2.3 dan 2.4. Perlu diperhatikan bahwa di dalam yurisdiksi asli Panel Khusus yang diberikan oleh Peraturan 2000/11, penyiksaan merupakan suatu larangan yang bersifat sementara. Walaupun Peraturan 2000/15 menjelaskan posisi tersebut, amandemen terkini terhadap Peraturan 2000/11 belum dapat menyelesaikan masalah inkonsistensi.

Laporan ini bertujuan menantang latar-belakang yang demikian mencolok. Sistem pengadilan apapun perlu melakukan evaluasi yang kontinu dan kajian-ulang berkala. Sistem pengadilan di Timor Lorosa'e sekarang telah diperkenalkan oleh UNTAET dengan sangat cepat. Jangka waktu dan cara yang digunakan untuk mendirikan sistem peradilan tersebut tampaknya mencoba mengawinkan desain dan implementasi tahap tunggal.<sup>5</sup> Keputusan UNTAET untuk mulai mengalihkan peran formal kepada Timor Lorosa'e bermakna dimasukkannya para pelaku kunci pengadilan ke dalam sistem peradilan darurat dengan pelatihan yang sangat sedikit dan kurang efektif, suatu administrasi pengadilan operasional. Dengan demikian, sebagaimana telah dikemukakan di atas, harus diakui bahwa UNTAET mesti menghadapi bulan Oktober 1999 yang di dalamnya hampir tidak ada sumber-daya materi lengkap dan tenaga-tenaga profesional lokal yang tersedia untuk segera mendirikan dan mengembangkan kemampuan peradilan. Pemerintah Transisi tidak hanya harus menangani infrastruktur sosial yang rusak, tetapi hancur sama sekali. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan besar telah dicapai berkat keadaan yang dialami misi tersebut pada akhir 1999. Akan tetapi, kehancuran yang diwarisi oleh UNTAET tidak dapat mengurangi perlunya suatu evaluasi untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan sekarang sedang berada pada dasar yang cocok agar dengan demikian memajukan sistem peradilan di Timor Lorosa'e.

## 1.2 Metodologi

### 1.2.1 *Judicial System Monitoring Programme*

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) merupakan suatu organisasi non pemerintah berbasis di Dili, Timor Lorosa'e yang memantau kegiatan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius. JSMP didirikan pada April 2001 untuk menyikapi perlunya para pemantau lokal dan internasional terus-menerus dan dipercaya dalam melakukan pemantauan menuju pembangunan sistem peradilan independen dari Pemerintahan Transisi PBB. JSMP bekerja sama dengan organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang hukum dan HAM guna memberikan kontribusi, baik untuk membangun budaya hukum di Timor Lorosa'e maupun komunitas keadilan internasional, dengan memberikan informasi dan analisa mengenai isu-isu yang berkaitan dengan proses didirikannya sistem peradilan baru yang tengah berlangsung. JSMP juga memantau para pegiat HAM Timor Lorosa'e maupun para pengacara internasional dari segi hukum biasa maupun yurisdiksi hukum sipil, dengan pengalaman perbandingan internasional dalam administrasi pengadilan dan hukum HAM. Para pemantau JSMP tidak mewakili Pemerintahan Transisi, suatu kelompok tersangka atau kelompok tertentu lainnya.

Panel Khusus untuk Kejahatan Serius telah dipilih dengan maksud mengadakan pemantauan khusus yang berkaitan dengan peran khususnya, baik di dalam sistem peradilan di Timor Lorosa'e yang baru maupun kontribusi yang diberikan terhadap pembangunan keadilan internasional. Di Timor Lorosa'e, organisasi ini lebih berkepentingan dalam melihat pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas kekejaman agar diseret ke pengadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses rekonsiliasi yang tengah berlangsung.<sup>6</sup> Ciri khas yang tinggi dari

---

<sup>5</sup> Fredrick Egonda-Ntende, "Building a new judiciary in East Timor: The first steps and missteps..." *Commonwealth Judicial Journal*, yang akan datang. Hakim Egonda-Ntende ialah salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Timor Lorosa'e sejak badan peradilan dibentuk hingga bulan November 2001.

<sup>6</sup> Regulasi UNTAET 2001/10 mendirikan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi. Proses konsultasi publik yang telah dilaksanakan sebelum penulisan rancangan regulasi ini secara konsisten menekankan perlunya keadilan sebelum rekonsiliasi. Sebagai hasilnya, Agenda 1 dari Regulasi tersebut menyatakan, "dalam situasi apapun pelanggaran kejahatan serius tidak boleh diatasi dengan Proses Rekonsiliasi Masyarakat"[penekanan dalam teks asli]. "Pelanggaran Kejahatan Serius" didefinisikan pada bagian 1(m) sebagai suatu pelanggaran yang didefinisikan pada bagian 10.1 dari Regulasi 2000/11 dan bagian 1.3 dan 4-9 dari Regulasi 2000/15.

kasus-kasus sebelumnya juga berarti bahwa Panel ini sementara dipandang sebagai ujian lakmus tentang kecakapan sistem peradilan baru untuk menuntaskan kasus-kasus secara seimbang dan efektif. Selanjutnya, sukses atau gagalnya Panel Khusus juga akan secara langsung mengefektif pada prakarsa internasional di bidang ini, termasuk kemungkinan pengadilan internasional bagi Timor Lorosa'e dan masa depan suatu turunan mekanisme pengadilan dalam negeri/internasional dalam masyarakat-masyarakat pasca-konflik lainnya. Karena itu, UNTAET akan dinilai oleh komunitas internasional dan masyarakat Timor Lorosa'e apakah Pemerintah Transisi ini telah menjalankan mandat yang dipercayakan Dewan Keamanan untuk mengadili pelaku kejahatan tahun 1999 dan membangun suatu sistem peradilan Timor Lorosa'e yang berkelanjutan.

Temuan yang disampaikan di dalam laporan ini dirangkum dari pantauan sidang-sidang pengadilan selama lebih dari delapan bulan yang dilakukan Panel Khusus pertama untuk Kejahatan Serius di Pengadilan Distrik Dili. Para pemantau JSMP telah mengikuti hampir semua persidangan yang telah digelar Panel Khusus dalam jangka waktu tersebut, termasuk sidang dengar-pendapat pendahuluan, persidangan, disposisi dijatuhkannya hukuman dan pembacaan dakwaan.<sup>7</sup> Selanjutnya, pemantauan ini telah dilengkapi dengan diskusi dan wawancara dengan sejumlah individu yang terlibat di dalam sistem peradilan menurut kapasitas profesionalnya, termasuk hakim, jaksa, pembela umum, pegawai pengadilan dan lain-lain. Sebagai satu-satunya organisasi independen yang secara konsisten telah memantau Panel Khusus untuk Kejahatan Serius, JSMP secara unik ditempatkan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang perlu dan pantas bagi sistem peradilan untuk tahap terkini perkembangannya.

### 1.2.2 *Kriteria-kriteria penilaian*

Menilai fungsi suatu sistem pengadilan akan berbeda-beda sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk menilai suatu sistem khusus yang sedang dinilai. Sejumlah standar yang diterima secara internasional meliputi misalnya, akses ke keadilan, surat keluar atau urutan waktu memproses kasus, kesamaan, keadilan atau integritas, independensi atau akuntabilitas, dan kepercayaan publik dan keyakinan pada sistem pengadilan.<sup>8</sup> Walaupun standar-standar demikian sangat membantu, di Timor Lorosa'e hampir tidak berfungsi jika membandingkan fungsi suatu sistem yang baru dibangun dari puing-puing kehancuran dengan sumber daya yang sangat terbatas dengan sistem pengadilan yang memiliki sumber daya yang sangat baik di negara maju. Kendatipun demikian, penting untuk mengidentifikasi sejumlah patokan dasar yang digunakan guna menakar pembangunan sistem yang baru tersebut. Departemen Kehakiman cenderung merujuk pada patokan-patokan kuantitatif, seperti jumlah penyidik, jumlah kasus yang disidangkan atau berapa dakwaan yang telah diarsipkan.<sup>9</sup> Sementara patokan-patokan ini merupakan penanda penting mengenai *apa* yang sedang dilakukan oleh sistem peradilan baru, patokan-patokan kuantitatif ini tidak dapat memberikan keterangan yang lebih banyak mengenai *kwalitas* keadilan yang sedang diberikan. Di dalam konteks mandat UNTAET dan sejarah Timor Lorosa'e, JSMP percaya bahwa berguna juga untuk menilai tingkat pembangunan sistem peradilan yang baru pada dasar *kwalitatif* sesuai dengan standar-standar internasional yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pengadilan yang adil.

---

<sup>7</sup> Mengenai daftar lengkap dari kasus-kasus yang dipantau, lihat Lampiran A pada laporan ini. Walaupun JSMP secara resmi didirikan pada bulan April, pemantauan terhadap kasus telah dimulai pada bulan Februari 2001.

<sup>8</sup> The United States Commission on Trial Court Performance Standards (1990). Prinsip-prinsip ini telah disesuaikan dan diterapkan di dalam pengadilan di Amerika Serikat, Australia, Singapore, dan Belanda.

<sup>9</sup> Lihat misalnya Lembaran Fakta UNTAET "Justice and Serious Crimes" #6, Juli 2001.

Ada sejumlah alasan dalam memilih metode penilaian ini. Jika sistem peradilan yang baru gagal memenuhi standar internasional mengenai hak-hak asasi manusia, sistem itu tidak dapat memenuhi perannya yang penting dalam membangun aturan hukum dan mengatasi warisan impunitas dan keadilan selektif yang menciri pendudukan Indonesia. Lagipula, Timor Lorosa'e telah berada di bawah pemerintahan PBB selama dua tahun dan PBB telah setuju untuk tetap memberikan bantuan yang signifikan setelah Timor Lorosa'e merdeka.<sup>10</sup> UNTAET berkewajiban, sesuai dengan mandatnya, untuk melaksanakan standar internasional mengenai HAM dalam upaya membangun negara merdeka yang terbaru, termasuk upaya membangun sistem yudisial<sup>11</sup>. Peninggalan UNTAET akan ditentukan oleh sistem yang telah ditetapkan akhirnya dapat berlanjut di masa-masa mendatang dan apakah sistem tersebut menegakkan atau bahkan meremehkan standar minimum dari PBB itu sendiri.

Pengamatan yang dirincikan dalam laporan menunjukkan masih ada sejumlah kekurangan serius dalam administrasi pengadilan yang sedang berfungsi, termasuk kekurangan-kekurangan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius. JSMP prihatin bahwa kekurangan-kekurangan ini menjadi bagian dari kualitas dan keadilan pengadilan yang sedang dilakukan oleh sistem peradilan baru, dan mengancam kenikmatan standar-standar internasional mengenai HAM yang sangat mendasar bagi suatu masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Bagian 2 laporan ini menggaris-bawahi sejumlah unsur utama administrasi pengadilan, perannya di dalam suatu sistem pengadilan yang adil dan efektif serta sejumlah keprihatinan umum yang berkenaan dengan struktur administrasi Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili sekarang. Bagian akhir menyetengahkan observasi-observasi JSMP di bidang-bidang keprihatinan khusus dengan mengacu pada standar pengadilan internasional yang adil dan mengusulkan sejumlah rekomendasi bagi perubahan bilamana perlu.

### 1.2.3 Cakupan laporan

Walaupun panel Khusus merupakan fokus primer, sejumlah observasi dan rekomendasi dapat juga menyingung administrasi seluruh sistem pengadilan. Kendatipun terdapat aspek-aspek lain dari sistem pengadilan baru yang patut mendapatkan analisis serupa, misalnya analisis yang berkaitan dengan perangkat hukum yang dapat diterapkan dan struktur lembaga kehakiman, aspek-aspek ini berada di luar cakupan laporan ini. Sebaliknya, laporan ini dibatasi mengingat pelaksanaan administrasi Panel Khusus. Perlu diperhatikan bahwa dalam menyusun laporan ini, frase "administrasi pengadilan" mengacu kepada segala aspek pelaksanaan Panel Khusus kecuali kasus-kasus yang sedang disidangkan. Walaupun terdapat tumpang-tindih di sana-sini di antara administrasi pengadilan dan administrasi Kantor Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Serius (Unit Kejahatan Serius) dan Penuntut Umum, laporan ini membatasi diri pada Panel Khusus itu sendiri kecuali jika ada hubungan langsung dengan kegiatan kantor-kantor tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk peran pihak otoritas penjara, CIVPOL UNTAET atau Kepolisian Timor Lorosa'e. Badan-badan ini merupakan bagian integral dari sistem hukum di Timor Lorosa'e dan telah menjadi bahan laporan dari pihak lain.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Lihat Laporan Kemajuan Sekretaris Jenderal tentang Pemerintahan Transisi di Timor Lorosa'e, 18 Oktober 2001 dan juga Siaran Pers Dewan Keamanan No 7192, 31 Oktober 2001.

<sup>11</sup> Lihat Bagian 5.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 dan Bagian 3 Regulasi UNTAET 1999/1 yang menyatakan bahwa semua pekerja publik di Timor Lorosa'e seyogyanya melaksanakan standar-standar yang diakui secara internasional termasuk segala standar yang relevan yang terkandung di dalam International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) (1966) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948).

<sup>12</sup> Lihat misalnya, Anne Marie Devereux, *Strengthening the Judicial Process in East Timor* Lembaran Laporan kepada Jesuit Refugee Service, 30 Juni 2000; Amnesty International, *Justice past, present and future*, Laporan ASA



Laoran ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dan masukan dari berbagai pihak, khususnya pihak yudisial dan staff lain di Departemen Kehakiman pemerintahan Transisi. Demikian juga, para pekerja pengadilan, staff Unit Kejahatan Serius, Unit HAM UNTAET dan pihak-pihak lainnya yang telah memudahkan para pemantau JSMP dalam melaksanakan tugas mereka. JSMP ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak ini dan menghargai kerja keras yang mereka lakukan dan prestasi mereka yang patut disebutkan di tengah-tengah situasi yang sulit. JSMP mengusulkan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan ini dengan harapan memberikan kontribusi bagi pembangunan suatu sistem pengadilan yang berkelanjutan dan adil bagi rakyat Timor Lorosa'e.

## 2 ADMINISTRASI PENGADILAN

### 2.1 Pentingnya administrasi pengadilan

Hak untuk diadili oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan imparisial merupakan batu penjurur dasar institusi suatu pengadilan yang adil. Hak ini diakui di dalam banyak instrumen internasional, lebih-lebih Artikel 14(1) dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).<sup>13</sup> Sistem pengadilan transisi di Timor Lorosa'e tentu saja didirikan di atas dasar tersebut, paling tidak dari segi hukum.<sup>14</sup> Standar internasional dan regional yang berkaitan dengan independensi badan kehakiman menjembatani hak luas dan mendasar ini dengan penerapan praktis dalam suatu sistem peradilan, yang mendesak bahwa "organisasi dan administrasi kehakiman di setiap negara seharusnya diilhami oleh prinsip-prinsip tersebut, dan upaya-upaya perlu dilakukan untuk menterjemahkan prinsip-prinsip tersebut secara lengkap dalam kenyataan."<sup>15</sup>

Sama halnya dengan organisasi atau institusi apapun, administrasi sistem pengadilan yang pantas sangat penting bagi segala aspek kerja pengadilan. Model-model administrasi pengadilan berbeda dari satu negara dengan negara lain. Demikian juga halnya dengan sistem pengadilan; tetapi, tanggung-jawab administrasi pengadilan harus tetap dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan itu sendiri.<sup>16</sup> Tanggung-jawab ini bisa saja dapat meliputi misalnya, supervisi dan kontrol atas personil administrasi, persiapan anggaran pengadilan dan perawatan gedung-gedung pengadilan. Ini merupakan corak penting dari suatu kehakiman yang independen, dan yang sering digambarkan sebagai aspek independensi yudisial "kolektif" atau "institusional". Sementara kepala pegawai yudisial sering mempunyai tanggung-jawab terakhir, yang sering disebut dengan Register, yang mengurus Registrasi, yang merupakan inti administrasi suatu pengadilan. Walaupun sebagian besar dari tugas administrasi yang secara terang-terangan dilaksanakan oleh kantor Registrasi, seperti pengaturan arsip-arsip kasus, publikasi keputusan pengadilan, dan mengurus dengar-pendapat, administrasi pengadilan juga meliputi kegiatan yang cakupannya lebih luas dari

57/001/2001, 27 Juli 2001; Erin Mobekk, *Policing Peace Operations: United Nations Civilian Police in East Timor*, Department of War Studies, Kings College, London, Oktober 2001.

<sup>13</sup>Lihat juga Artikel 10 dari Universal Declaration of Human Rights, Artikel 8 (1) dan 27 (2) dari American Convention on Human Rights, Artikel XXVI dari American Declaration of the Rights and Duties of Man, Artikel 6 (1) dari European Convention on Human Rights, Artikel 7 (1) dan 26 dari African Charter on Human and Peoples' Rights, and the Basic Principles on the Independence of the Judiciary

<sup>14</sup>Bagian 2.1 dari Regulasi UNTAET 2000/30; walaupun kata-kata "independen dan imparisial" dihapus, prinsip-prinsip ini masih merupakan bagian utuh dari standar internasional mengenai hak asasi manusia yang juga dicakup oleh Bagian 3 dari Regulasi 1999/1 yang dirujuk pada catatan no. 11 di atas.

<sup>15</sup> Lihat misalnya pembukaan dari UN Basic Principles on Independence of the Judiciary (1985) dan Lawasia Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary (1995); juga,

<sup>16</sup> Lihat Shimon Shetreet, "The Challenge of Judicial Independence in the Twenty-First Century", (2000) 8 *Asia Pacific Law Review* 153.

tugas-tugas ini. Dukungan administrasi yang memadai bagi para hakim dan hubungan dekat antara hakim dengan personil pengadilan yang lain sangat penting jika urusan yang paling penting dari para hakim di dalam menuntaskan sengketa-sengketa sesuai dengan hukum tersebut bekerja secara efektif dan adil. Selanjutnya, dalam menyelamatkan imparialitas dan independensi sistem pengadilan, suatu administrasi pengadilan kerap berperan sebagai badan penengah antara hakim dengan pihak-pihak lain yang berinteraksi dengan pengadilan, mulai dari pemerintah hingga para pegawai penjara, media, publik dan pihak-pihak lain yang menggunakan pengadilan.

Untuk menyebutkan salah satu contoh, Registrasi dari Pengadilan Kriminal Internasional bagi bekas Yugoslavia (selanjutnya, ICTY) bertanggung-jawab atas “pekerjaan administrasi dan dukungan yudisial bagi Pengadilan...[termasuk] terjemahan dan juru-bahasa berbagai sidang pengadilan, mengawasi pusat penahanan, menyediakan bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu dan tetap menjalin hubungan dengan negara-negara dan perwakilannya demikian juga halnya dengan komunikasi-komunikasi resmi ke dan dari Pengadilan”<sup>17</sup>. Aturan prosedur ICTY tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa fungsi seorang Register ialah untuk mendukung para hakim di dalam melaksanakan fungsinya dan bahwa “di bawah kewenangan Presiden, Register harus bertanggung-jawab kepada administrasi dan pekerjaan Pengadilan dan akan berfungsi sebagai saluran komunikasinya.”<sup>18</sup>

Dalam upaya mengakui pentingnya administrasi pengadilan, Komisi HAM PBB menghimbau pemerintah “untuk menyertakan administrasi pengadilan di dalam rencana pembangunan nasional sebagai bagian integral dari proses pembangunan”.<sup>19</sup> Dalam banyak situasi, merupakan fakta administrasi pengadilan sebagai tulang-punggung suatu sistem pengadilan yang sedang berfungsi dan piranti dalam sistem pengadilan untuk memenuhi standar-standar internasional mengenai HAM.

## 2.2 Struktur administrasi Panel Khusus

Karena Panel Khusus untuk Kejahatan Serius merupakan bagian dari Pengadilan Distrik Dili, Panel Khusus merupakan bagian struktur administratif yang sama yang berlaku juga bagi pengadilan lainnya. Pada mulanya, “Keprisidenan” dari masing-masing Pengadilan Distrik, yang terdiri dari tiga hakim, diberi tanggung-jawab untuk masing-masing administrasi pengadilan, “termasuk pelaksanaann kewajiw-an-kewajiban secara teratur dan sigap”<sup>20</sup> Tetapi, perubahan regulasi sekarang yang mengatur tentang organisasi pengadilan telah memperlihatkan restrukturisasi yang signifikan di bidang administrasi. Para karyawan pengadilan senior dari semua pengadilan di Timor Lorosa’e sekarang telah menjadi Presiden Pengadilan Tingkat Banding yang “bertanggung-jawab atas seluruh administrasi pengadilan di Timor Lorosa’e.”<sup>21</sup> Regulasi tersebut juga memberikan kekuasaan lebih luas kepada Presiden Pengadilan Tinggi untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan “praktek administratif”.

Untuk setiap Pengadilan Distrik, suatu jabatan baru bagi Administrator Hakim dibentuk bulan Juli 2001.<sup>22</sup> Administrator Hakim sekarang akan bertanggung-jawab atas segala urusan administrasi pengadilan, yang harus tunduk pada arahan dan pengawasan dari Presiden

---

<sup>17</sup> Lihat website ICTY pada [www.icty.un.org](http://www.icty.un.org).

<sup>18</sup> Aturan 33, ICTY Rules of Procedure.

<sup>19</sup> UN Human Rights Commission Resolution 2000/39, 20 April 2000, paragraf 4.

<sup>20</sup> Bagian 17.1 dari Regulasi 2000/11.

<sup>21</sup> Bagian 17.1 dari Regulasi 2000/11 yang diamandemen oleh Regulasi-Regulasi 2001/18 dan 2001/25.

<sup>22</sup> Bagian 1.9 dari Regulasi 2001/18

Pengadilan Tinggi. Seorang hakim dari setiap Pengadilan Distrik akan ditunjuk untuk jabatan ini untuk periode yang dapat diperbaharui selama satu tahun.<sup>23</sup>

Bagian 21 dari Peraturan 2000/11 membentuk Register pada setiap pengadilan. Masing-masing Register bertanggung-jawab atas penerimaan dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh pengadilan yang bersangkutan, organisasi dan keamanan dokumen-dokumen pengadilan, “dan untuk fungsi-fungsi lainnya yang diperkenankan oleh suatu peraturan atau arahan UNTAET.” Peraturan juga memberi catatan bahwa staff register yang melaksanakan segala tanggung-jawab ini di bawah arahan dari Administrator Hakim *atau* Presiden Pengadilan Tinggi dan bahwa mereka “seyogyanya memiliki kecakapan hukum dan administrasi”.<sup>24</sup>

Ada suatu ketentuan lain yang menyatakan bahwa “masing-masing pengadilan di Timor Lorosa’e seharusnya memiliki staff yang berkualitas sebagaimana dituntut oleh pengadilan yang pantas berfungsi dan pelaksanaan tanggung-jawab para hakim” dan bahwa “masing-masing panel hakim akan dibantu selama sidang-sidang pengadilan oleh seorang anggota staff pengadilan.”<sup>25</sup> Staff pengadilan juga akan bekerja di bawah arahan Presiden Pengadilan Tinggi, yang berwenang untuk memindahkan para staff dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain atau tugas bila dipandang perlu demi “suatu penyebaran sumber daya manusia yang merata dan kemudahan kerja.”<sup>26</sup> Walaupun peraturan tersebut tidak banyak menyebutkan tentang hal itu, seorang staff administrasi senior yang agaknya secara samar disebut dengan “Register Pengadilan” yang dalam prakteknya lebih banyak akan mengawasi segala registrasi dan staff pengadilan di setiap pengadilan.

Walaupun ada pembagian legislatif, dalam prakteknya tidak ada perbedaan menyolok antara staff pengadilan dan staff registrasi; panitera pengadilan melaksanakan dua peran tersebut. Mengenai tim 12 panitera pengadilan untuk Pengadilan Distrik Dili, ada dua orang panitera yang bertanggung-jawab atas kantor Registrasi Kejahatan Serius yang berbeda<sup>27</sup>. Tugas kedua panitera ini antara lain meliputi menerima dokumen-dokumen yang diarsipkan berbagai pihak, merawat arsip-arsip kasus kejahatan serius, menjaga statistik muatan kasus, dan memperhatikan jadwal pusat mengenai daftar sidang dengar-pendapat pengadilan.

### 2.2.1 *Hakim-hakim sebagai administrator*

Dibentuknya jabatan Administrator Hakim tampaknya merupakan suatu langkah positif untuk memperbaiki kurangnya fokus awal pada masalah administrasi dalam pengadilan. Sementara hal ini bisa jadi merupakan suatu cara yang berguna untuk menjamin bahwa para hakim baru Timor Lorosa’e memperoleh pemahaman mengenai segala aspek kerja pengadilan, sangat penting pelatihan yang dikhususkan pada administrasi pengadilan harus diberikan kepada para Administrator Hakim pertama. Pelatihan yudisial biasa dan hukum tidak dapat melengkapi seorang hakim dengan kecakapan-kecakapan yang dituntut dan pengetahuan untuk melaksanakan suatu administrasi pengadilan, khususnya mengingat hakim-hakim baru memiliki pengalaman yang sangat terbatas mengenai kinerja kerja pengadilan itu sendiri.

---

<sup>23</sup> Bagian 6A dari Peraturan 2000/11 sebagaimana diamandemen oleh Peraturan 2001/18 2001/25.

<sup>24</sup> Bagian 21.2 dan 21.3 dari Peraturan 2000/11, penekanan

<sup>25</sup> Bagian 22 dari Peraturan UNTAET 2000/11, seperti diamandemenkan oleh Peraturan UNTAET 2001/25.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Pernah ada tiga orang panitera akan tetapi belakangan ini salah seorang telah pergi untuk belajar hukum di Portugal. Belum jelas ia akan kembali ke pengadilan.

Dalam artian tertentu, dapat dipertanyakan apakah wajar bagi seorang Administrator Hakim Pengadilan Distrik Dili bertanggung-jawab atas administrasi Panel Khusus untuk Kejahatan Serius. Hal-hal administratif yang berbeda dan lebih rumit, seperti sifat multilingual dari sidang dengar-pendapat dan dokumen-dokumen pengadilan yang tebal, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak terdakwa dalam dakwaan-dakwaan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kenyataannya Panel Khusus selalu mengerjakan sesuatu yang agaknya berbeda dengan panel-panel Pengadilan Distrik Dili yang lain. Sejumlah hakim Panel Khusus berupaya untuk mengatur hampir seluruh aspek administrasi, termasuk publikasi keputusan pengadilan dan daftar kasus, yang bahkan pada umumnya mendapatkan arsip-arsip pengadilan dari kasus-kasus yang masih aktif di depan mereka.<sup>28</sup> Bagian 3 dari laporan ini mengemukakan masalah-masalah administrasi utama yang dihadapi oleh Panel Khusus. Patut diperhatikan bahwa hingga dewasa ini, belum ada peningkatan yang berarti di dalam administrasi Panel Khusus walaupun dengan hadirnya sistem Administrator Hakim yang baru. Hal ini bisa saja disebabkan oleh pergantian personil pada Pengadilan Distrik Dili, tetapi situasi ini harus menjadi bahan pemantauan dan kajian terus-menerus secara seksama.<sup>29</sup>

### **2.2.2 Staff Registrasi dan pengadilan**

Pada pertengahan tahun 2000 seorang Administrator Pengadilan dikontrak Departemen Urusan Yudisial (seperti disebut pada saat itu) dari pemerintah Selandia Baru. Walaupun ia menetapkan rencana usaha dan struktur organisasi bagi administrasi pengadilan, ia hanya bekerja di posisi ini selama tiga bulan. Tampaknya rencananya tidak diteruskan dan proses pembangunan sistem administrasi pengadilan tertunda hingga harus dimulai dari nol lagi pada Februari tahun 2001 ketika Administrator Pengadilan yang sekarang diangkat. JSMP memahami bahwa ia memiliki pengalaman mengenai pelatihan administrasi pengadilan dan ia telah mengawasi pembangunan kemampuan para panitera pengadilan dan mendirikan prosedur-prosedur untuk setiap pengadilan di Timor Lorosa'e. Ia dibantu oleh dua penasehat panitera internasional yang disediakan sebagai bagian dari kontribusi Program Pembangunan PBB (UNDP) terhadap sistem pengadilan; mereka masing-masing tiba di bulan April dan Juli 2001. Walaupun upaya menasehati dan mengkoordinir merupakan suatu perkembangan yang sangat positif, masih ada saja sejumlah bidang administrasi pengadilan yang belum berfungsi sama sekali. Tugas seorang Administrator Pengadilan telah dihambat oleh kenyataan bahwa sangat sedikit orang Timor Lorosa'e yang memiliki pengalaman di bidang tersebut, dan lebih-lebih, tidak mendapatkan pelatihan di bidang hukum. Hal ini telah diperparah juga dengan fakta bahwa staff administrasi pengadilan yang telah melaporkan bahwa para hakim dan jaksa kelihatannya tidak memahami peranan staff pengadilan dan karena itu mengarah kepada kurang adanya koordinasi dalam pelaksanaan tugas mereka.

Staff pengadilan juga melaporkan bahwa hingga sekarang pelatihan kepada mereka hanya bersifat sementara dan diarahkan untuk tugas-tugas khusus daripada memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai peranan dan tanggung-jawab yang dilibatkan dalam administrasi pengadilan. Mereka mengeluh bahwa materi pelatihan sistem pengadilan luar negeri secara sederhana telah dialihkan ke dalam situasi sekarang tanpa modifikasi yang memadai dan penilaian yang kritis. Para panitera mengakui bahwa kebutuhan akan pelatihan sistematis

---

<sup>28</sup> Lihat bagian 3.1 di bawah untuk rincian lebih lanjut.

<sup>29</sup> Hakim Domingos Sarmiento, Presiden Pengadilan Distrik Dili, diangkat sebagai Administrator Hakim yang pertama dari Pengadilan tersebut tetapi hanya mengabdikan selama beberapa minggu sebelum diangkat sebagai Wakil Menteri Kesehatan di dalam pemerintahan Transisikedua. Hakim Aderito Tilman baru saja diumumkan sebagai Administrator Hakim yang baru untuk Pengadilan Distrik Dili.

lebih banyak lagi yang difokuskan pada diciptakannya sistem yang berkelanjutan dan mendorong staff Timor Lorosa'e memikul tanggung-jawab lebih banyak dari cakupan tugas-tugasnya.

***Rekomendasi 1: Bahwa struktur administrasi Panel Khusus untuk Kejahatan Serious harus dipantau dan diteliti, termasuk mempertimbangkan apakah suatu struktur administrasi yang berbeda akan menjadi lebih efektif.***

***Rekomendasi 2: Bahwa Presiden Pengadilan Tinggi, setiap Administrator Hakim dan Administrator Pengadilan bersama-sama melakukan penilaian yang sistematis mengenai kebutuhan-kebutuhan administrasi, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pelatihan lebih lanjut bagi staff, dan wilayah tanggung-jawab.***

***Rekomendasi 3: Bahwa program pelatihan menyeluruh yang dikhususkan di bidang administrasi pengadilan diberikan kepada para panitera pengadilan demikian juga halnya kepada Administrator Hakim sebagai bagian dari program pelatihan yudisial.***

### **3 BIDANG-BIDANG KEPRIHATINAN KHUSUS**

#### **3.1 Sumber daya yudisial**

Standar-standar internasional yang berkenaan dengan suatu pengadilan independen menuntut pihak berwenang yang memerintah untuk menyediakan sumber-daya yang memadai guna memungkinkan pengadilan melaksanakan fungsi-fungsinya dengan layak<sup>30</sup> Hal ini tercermin di dalam Bagian 34 dari Regulasi UNTAET 2000/11 yang menyatakan bahwa 'selama masa transisi, UNTAET akan menyediakan dukungan finansial dan teknis kepada pengadilan di Timor Lorosa'e.'

Tetapi, para pemantau JSMP telah memperhatikan sejumlah masalah yang berkaitan dengan sumber daya terus-menerus terjadi di dalam administrasi Panel Khusus. Jika hal itu terus dibiarkan, masalah-masalah ini berpotensi memiliki efek langsung pada hak untuk diadili di depan suatu pengadilan yang kompeten itu diperoleh oleh para terdakwa yang tampil di depan Panel. Menurut banyak pelaku pengadilan dan pemantau independen, jelas bahwa tuntutan hukum UNTAET sendiri belum dipenuhi. Dukungan finansial dan teknis pun diulur-ulur dengan masalah kemampuan. Sementara situasi ini lebih jelas dibatasi oleh sumber-daya finansial yang tersedia, baik melalui anggaran UNTAET yang dinilai maupun Dana Kepercayaan Gabungan untuk anggaran Timor Lorosa'e bagi ETTA, para hakim dan administrasi pengadilan harus memainkan peran signifikan dalam mengidentifikasi prioritas sumber-daya bagi peradilan dan pengadilan pada umumnya. Masyarakat internasional, melalui Komisi HAM PBB, telah berulang-kali mengundang anggotanya untuk membantu meminta bantuan finansial dan teknis guna memperkuat administrasi pengadilan, khususnya dalam situasi-situasi pasca-konflik.<sup>31</sup>

#### **3.1.1 Fasilitas-fasilitas penelitian**

Kurangnya bantuan penelitian hukum merupakan suatu hal yang sangat akut. Semua hakim memerlukan fasilitas penelitian yang cukup tetapi di Timor Lorosa'e kebutuhan itu diperparah oleh kurangnya pengalaman dan belum lamanya yurisdiksi Kejahatan Serious.

---

<sup>30</sup> Lihat Prinsip 7 dari UN Basic Principles of Independence of the Judiciary; lihat juga Resolusi Sidang Umum 54/163, 23 Februari 2000.

<sup>31</sup> Lihat Resolusi Komisi HAM PBB 2000/39, 20 April 2000.

Bagi para hakim Timor Lorosa'e yang bekerja pada Panel Khusus, hal ini merupakan pengangkatan yudisial mereka yang pertama. Tetapi, bahkan bagi hakim-hakim internasional yang telah bekerja sebagai hakim di negara mereka sendiri, dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana terkandung di dalam Regulasi UNTAET 2000/15 merupakan suatu pengalaman baru bagi mereka juga. Meskipun hal ini merupakan fakta dari regulasi yang sama yang menuntut bahwa "di dalam seluruh komposisi panel laporan seharusnya dibuat berdasarkan pengalaman para hakim di bidang hukum kriminal, hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM."<sup>32</sup>

Tidak ada satu keputusan pun yang diambil oleh Panel Khusus telah memasukkan yurisprudensi internasional apapun hingga hari ini.<sup>33</sup> Para hakim secara literal sedang mencari alasan baru pada setiap keputusan baru. Salah satu sumber utama bimbingan para hakim Panel Khusus dan rekan-rekan mereka di Pengadilan Tinggi ialah yurisprudensi ICTY dan ICTR, demikian juga sumber-sumber hukum internasional lainnya seperti pekerjaan Komisi Hukum Internasional dan Komisi Persiapan bagi Pengadilan Kriminal Internasional yang akan datang. Jumlah hakim di seluruh dunia yang memiliki pengalaman di bidang yang baru ini tergolong masih sangat sedikit. Tetapi sejak didirikannya ICTY, telah ada ledakan keinginan di bidang itu baik di kalangan akademisi maupun para praktisi hukum serta para hakim.

Demikian juga, para hakim belum memiliki akses ke internet, yang merupakan salah satu cara termudah dalam menyediakan fasilitas penelitian hukum yang krusial. Sekarang para hakim harus menghabiskan waktu di kafe internet PBB untuk melakukan penelitian dasar atau mengkontak rekan-rekan internasional di bidang hukum. JSMP memandang bahwa kurangnya sarana komputer dan tiadanya akses ke internet telah disampaikan sebagai suatu masalah di bulan Juni tahun 2000, lebih dari satu tahun yang lalu.<sup>34</sup>

### 3.1.2 *Sumber daya material*

Sarana penelitian sangat jelas berkaitan dengan bagian sumber-daya material yang paling dasar misalnya perpustakaan pengadilan. Suatu perpustakaan pengadilan yang berfungsi, dan mudah dijangkau oleh para praktisi hukum, jaksa penuntut umum dan hakim, masih belum ada. Dewasa ini terdapat koleksi buku-buku sementara yang disumbangkan dan disimpan di dalam rak buku di ruang pertemuan Menteri Kehakiman. Ketika JSMP belum lama ini mencoba melihat koleksi buku-buku tersebut guna mengetahui berapa buku yang telah dipajang di dinding. Sebagian besar dari buku-buku tersebut merupakan salinan antik mengenai profesi hukum Australia yang di bidang hukum yang sangat dikhususkan. Tidak ada buku mengenai hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia atau teks-teks rujukan hukum yang paling dasar. Hampir semua buku ditulis dalam bahasa Inggris.

---

<sup>32</sup> Bagian 23.2 dari Regulasi 2000/15. Selanjutnya, Regulasi UNTAET 1999/3 yang mendirikan Komisi Pelayanan Kehakiman Transisi yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Administrator Transisi mengenai pengangkatan yudisial. Akan tetapi tak seorang pun hakim internasional yang ditunjuk untuk Panel Khusus tidak mengikuti proses ini, dengan demikian memunculkan pertanyaan apakah Panel Khusus berkompeten secara legal. Untuk diskusi lebih lanjut, lihat Fredrick Egonda-Ntende, "Building a new judiciary in East Timor: The first steps and missteps..." *Commonwealth Judicial Journal*, pada no. 5 di atas.

<sup>33</sup> Hal ini menjadi begitu ganjil di dalam kasus *The Publik Prosecutor v Joseph Leki*, di mana Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum semuanya merujuk kepada keputusan ICTY dan ICTR di dalam pernyataan tertulis dan lisan mereka. Akan tetapi, segala keputusan yang ditempon sekarang bahwa semua terdakwa dikenai hukuman sesuai dengan KUHP. Situasi seperti ini dengan sendirinya akan berubah jika ada keputusan pertama yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan itu dipublikasikan.

<sup>34</sup> Lihat Annemarie Devereux, "Strengthening the Judicial Process in East Timor", suatu Lembar Laporan yang dipersiapkan kepada Jesuit Refugee Service, 30 Juni 2000, Rekomendasi 2.

Seorang pustakan pengadilan yang benar-benar terlatih dibutuhkan untuk mengatur dan memperoleh materi-materi yang perlu didefinisikan oleh kebutuhan para hakim.

Dengan kata lain, mengenai sumber-daya material juga situasi para hakim Panel Khusus sangat memprihatinkan. Tiga hakim yang baru-baru ini menangani Panel Khusus yang pertama semuanya memiliki kantor berukuran sedang yang di dalamnya hanya ada dua komputer desktop dan satu komputer laptop portable. Hal ini bukan merupakan suatu lingkungan yang kondusif bagi pola pikir peradilan yang diperhitungkan dan independen oleh masing-masing hakim. Komputer-komputer ini pun tidak di jaringan-kerjakan untuk memungkinkan manajemen informasi yang efisien dan berbagi sumber-daya yang sangat minim seperti satu printer. Versi elektronik yang terakhir dari segala keputusan pengadilan disimpan dalam *hard drive* dari salah seorang hakim, dan versi terjemahan Indonesia bahkan lebih tidak praktis lagi disimpan dalam komputer hakim yang lain dan yang lainnya dengan penterjemah sendiri.

### **3.1.3 Dukungan Administratif**

Dalam kaitannya dengan dukungan teknis, salah satu kekurangan yang paling kentara sekarang ialah kurangnya staff dukungan terhadap hakim-hakim Panel Khusus dalam wilayah kerja mereka. Tanpa adanya panitera hukum, para hakim tidak hanya melakukan segala penelitian legal tetapi juga menulis, mengedit, membaca-ulang sendiri semua naskah dakwaan pengadilan. Tanpa adanya suatu dukungan panitera administratif, para hakim bahkan harus mengetik dan memperbaiki naskah dakwaan. Kualitas produksi dakwaan yang telah dihasilkan selama ini lebih sering menggambarkan persoalan-persoalan ini.

Di pengadilan, para pemantau JSMP telah melihat berulang-ulang tiadanya panitera pengadilan. Walaupun panitera hadir pada saat sidang dengar-pendapat, tanggung-jawab untuk menjalin hubungan dengan pelaku pengadilan yang lain masih tetap merupakan tanggung-jawab hakim bersangkutan. Umumnya hakim pemimpin sidang yang akan berlari di sekitar gedung pengadilan sebelum suatu sidang dengar-pendapat untuk menentukan apakah semua pengacara, tersangka, dan para juru-bahasa telah tiba dan sidang tersebut siap dimulai. Dalam kesempatan-kesempatan biasa di mana sebuah sidang yang sedianya sudah dimulai tertunda lagi karena tidak hadirnya satu atau lebih dari para pelaku pengadilan, jaksa yang biasanya kembali ke ruang pengadilan dan menyampaikan keadaan demikian kepada hadirin, termasuk publik. Jika ada gangguan di luar gedung pengadilan atau media yang tidak mematuhi larangan untuk mengambil gambar di pengadilan misalnya, masih merupakan hakim dan bukan panitera yang memikul tanggung-jawab ini untuk membereskan situasi.

### **3.1.4 Mobilisasi sumber-daya**

Sebagian besar dari masalah-masalah sumber-daya material dan personil yang dirincikan di atas telah menjadi bahan keluhan umum dari para hakim Panel Khusus. Negara-negara donor dan Organisasi Non Pemerintah internasional telah berulang-kali menjanjikan bantuan kepada Departemen Kehakiman. Kelihatannya salah satu alasan mengapa terus-menerus mengalami kekurangan sumber-daya ialah kurangnya struktur administrasi guna mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan, mempersiapkan permintaan pendanaan dan sumber-daya dan mencoba menindak-lanjuti hal-hal seperti itu dengan para donor. Apakah tanggung-jawab untuk mengurus hal yang demikian berada di pundak Departemen Kehakiman atau seorang pejabat di hirarki pengadilan, hal itu tentu saja perlu diputuskan pengadilan. Situasi menyesakkan yang dialami oleh UNTAET dua tahun silam semestinya

telah memberikan mandat suatu pencarian bantuan yang terkoordinir dan tetap. Tidak dapat diterima bahwa sejumlah nota kesepakatan kerja sama dengan negara-negara donor telah menghabiskan waktu lebih dari dua belas bulan untuk merampungkannya. Dalam hal lainnya, tawaran bantuan yang paling dibutuhkan telah menyusut. Beberapa negara donor telah melaporkan kurangnya koordinasi donor merupakan hambatan terbesar bagi tersedianya bantuan material dan teknis kepada Departemen Kehakiman. Penundaan-penundaan administratif yang demikian sedang melumpuhkan sistem yang sudah berjuang.

***Rekomendasi 4:*** *Bahwa satu orang panitera internasional atau asisten peneliti dengan pengetahuan yang khusus di bidang hukum pidana internasional harus direkrut bagi setiap hakim pada Panel Khusus dan Pengadilan Tinggi sebagai suatu hal yang mendesak.*

***Rekomendasi 5:*** *Bahwa akses ke internet disediakan di ruang kerja para hakim Panel Khusus secepat mungkin.*

***Rekomendasi 6:*** *Bahwa suatu posisi yang tetap bagi seorang pustakawan Timor Lorosa'e di pengadilan diciptakan dan diisi secepatnya. Orang ini harus memiliki tanggung-jawab atas administrasi anggaran perpustakaan, menyediakan sejumlah majalah dan buku yang relevan, dan mendapatkan pelatihan yang dikhususkan dalam keterampilan perpustakaan hukum. Idealnya, pembangunan kapasitas ini berlangsung di dalam Timor Lorosa'e oleh seorang pustakawan pengadilan internasional berpengalaman yang disediakan oleh UNDP atau negara donor atau ORNOP yang lain selama kurang lebih tiga bulan.*

***Rekomendasi 7:*** *Bahwa salah seorang panitera pengadilan Panel Khusus ditugaskan bertanggung-jawab untuk menciptakan hubungan yang dekat dengan para hakim mengenai kebutuhan sumber-daya umum yang terus-menerus dan mobilisasi sumber-daya melalui seorang Koordinator Penghubung Donor.*

### **3.2 Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tak wajar**

Artikel 14(3)(c) dari ICCPR menjamin hak seseorang untuk diadili “tanpa penundaan yang tak wajar”. Komite HAM PBB telah menegaskan bahwa:

*Jaminan ini tidak hanya berkenaan dengan waktu dimulainya suatu pengadilan, tetapi juga waktu pengadilan itu harus selesai dan dakwaan dijatuhkan: semua tahap harus berlangsung “tanpa penundaan yang tak wajar”. Guna mengefektifkan hak ini, harus disediakan suatu prosedur untuk menjamin bahwa pengadilan akan berlangsung “tanpa penundaan yang tak wajar”, baik pada tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.<sup>35</sup>*

Dibandingkan dengan hampir semua pengadilan di seluruh dunia, Panel Khusus pertama telah berupaya memproses kasus-kasus yang dihadapi panel ini dengan sedikit lebih cepat.<sup>36</sup> Karena itu perbandingan, terutama dengan ICTY dan ICTR harus dibuat dengan agak hati-hati. Kendatipun demikian harus diperhatikan bahwa sejauh ini semua kasus yang diproses agar disidangkan, selain satu kasus, merupakan kasus-kasus yang secara relatif ringan dengan melibatkan seorang terdakwa dengan para saksi yang sangat sedikit, baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

---

<sup>35</sup>Komentar Umum Komite HAM PBB 13, 13 April 1984, pada paragraph 10.

<sup>36</sup> Panel Khusus kedua masih harus menuntaskan satu kasus lagi.



Masalah penahanan pra-peradilan yang tidak dapat diterima merupakan suatu masalah yang serius pada tahap-tahap awal perkembangan sistem pengadilan. Pada pertengahan tahun pertama tahun 2001 masih cukup banyak juga jumlah tahanan Kejahatan Serius yang ditahan secara ilegal karena masa tahanan mereka telah berakhir. Unit HAM UNTAET melaporkan bahwa hal ini “disebabkan oleh ketidakmampuan pihak pengadilan untuk mendengar permohonan untuk memperpanjang perintah penahanan”.<sup>37</sup> Dalam kaitannya dengan kasus-kasus Kejahatan Serius, kasus-kasus seperti ini telah diatasi walaupun masih ada laporan yang menyebutkan adanya masalah yang terus-menerus di bidang yurisdiksi kejahatan biasa. Tetapi, kasus-kasus Kejahatan Serius sekarang sedang mengalami masalah administrasi yang lain yang sebenarnya membahayakan hak untuk diadili tanpa penundaan yang tak wajar.

Apa yang dipandang sebagai “penundaan yang tidak wajar” akan sangat tergantung pada keadaan kasus-kasus tersebut. Pengadilan HAM Eropa telah mendaftarkan sejumlah kriteria, yang ditambahkan pada waktu sebenarnya yang digunakan untuk memproses sebuah kasus hingga mencapai keputusan akhir. Kriteria-kriteria ini meliputi hal-hal yang berkaitan erat dengan kompleksitas suatu kasus, apa yang dipertaruhkan terdakwa, penanganan kasus oleh pihak-pihak yang berwenang dan kelakuan terdakwa. Walaupun pada pertengahan tahun 2001 kasus-kasus Kejahatan Serius yang dakwaannya telah diberitacarakannya oleh Panel Khusus yang pertama telah berjalan dalam suatu sistem pengadilan yang baik, masalah-masalah penundaan secara administratif yang berulang-ulang terjadi belum ditangani dan lebih diperparah lagi dengan dimulainya kasus Los Palos di bulan Juli, yang berarti bahwa semua kejahatan serius lain yang masih aktif menjadi benar-benar dipetikeskan karena kurangnya kapasitas pengadilan untuk menggelar pengadilan. Relevan untuk melihat bahwa Pengadilan HAM Eropa telah mengatakan bahwa pada umumnya hal ini bukan merupakan alasan yang absah ketika mengevaluasi proses yang wajar, karena negarane-negara yang menanda-tanganinya berkewajiban mengatur administrasi keadilan sedemikian rupa sehingga pengadilan memenuhi standar minimum pengadilan yang adil.<sup>38</sup> Para pemantau JSMP telah melihat bahwa “prosedur” yang dirujuk oleh Komite HAM di atas kelihatannya perlu dilaksanakan lebih sebagai suatu hal yang biasa karena kelihatannya masalah-masalah administrasi yang belakangan ini terus-menerus menggegoroti telah mengancam meremehkan aspek hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Masalah-masalah ini secara garis besar dibagi ke dalam dua kategori: pertama, masalah dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak otoritas penjara dan kedua, manajemen yang lemah dalam panel-panel itu sendiri.

### **3.2.1 Hubungan dengan pihak otoritas penjara dan CIVPOL**

Para pemantau JSMP juga menemukan hampir menjadi suatu hal pasti bahwa persidangan harus ditunda karena terdakwa sendiri tidak ada di pengadilan pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan. Lebih sering, Panel Khusus bahkan masuk secara resmi ke dalam ruang pengadilan saat tidak ada seorang panitera yang meyakinkan bahwa semua pihak telah ada dan menyampaikan hal itu kepada hakim. Satu hal yang lebih jelas mengenai situasi seperti ini ialah bahwa hal ini sering terjadi dalam kaitannya dengan seorang terdakwa yang sedang dalam tahanan negara. Dalam banyak hal, alasan yang diberikan mengenai hal ini ialah perlunya melakukan pengaturan untuk membawa terdakwa

---

<sup>37</sup> Laporan Unit HAM UNTAET, Maret 2001. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai masalah tersebut lihat Suzannah Linton, “Cambodia, East Timor and Sierra Leone: Experiments in International Justice” (2001) XII *Criminal Law Forum*, yang akan datang.

<sup>38</sup> Lihat misalnya Pengadilan *Milasi*, A119, hlm. 47.

ke pengadilan yang harus dibuat dengan pihak otoritas penjara yang ada. Dalam beberapa kesempatan hal seperti ini telah menghasilkan penundaan yang singkat sekitar setengah jam atau lebih sementara pengadilan (lebih sering hakim pemimpin sidang yang melakukan hal itu sendiri) berupaya untuk membawa terdakwa ke pengadilan. Tetapi, telah ada jumlah yang berarti dari kasus persidangan yang ditunda ke tanggal lain sama sekali, seringkali diulang lagi. Untuk keluarga, saksi dan lainnya yang mengadakan perjalanan ke pengadilan di Dili dari kabupaten-kabupaten yang jauh dengan tujuan hanya untuk mengikuti sidang dengar-pendapat, pihak-pihak ini barangkali tidak melakukan lagi hal yang sama dan dengan demikian penundaan tersebut telah mengakhiri kemampuan mereka dalam proses pengadilan secara efektif<sup>39</sup>.

Pihak berwenang penjara melaporkan bahwa administrasi pengadilan sering gagal memberikan dokumentasi yang perlu untuk mendukung permintaan membawa orang dari penjara ke pengadilan agar diadili atau sidang pra-peradilan. Dalam sejumlah kasus pihak penjara tidak diberitahu sama sekali bahwa terdakwa diminta untuk hadir di pengadilan. JSMP telah ada di pengadilan ketika, setelah penundaan yang substansial, pemimpin sidang yang agak menyebalkan tampaknya telah memerintahkan staff penjara untuk “hanya telpon penjara dan katakan kepada mereka untuk membawanya masuk!” Tentu saja tidak mengherankan bahwa, pihak berwenang penjara tidak siap untuk mengikuti permintaan serupa tanpa dokumentasi yang mendukung.

Jika terdakwa tidak berada dalam tahanan, tetapi harus memenuhi permintaan yang melaporkan di distrik-distrik, pengaturan kadang-kadang harus dibuat dengan CIVPOL untuk membawa tersangka ke Dili. Tetapi pada sejumlah kejadian, pihak CIVPOL sendiri tidak mempunyai mobil, atau staff, untuk membawa tersangka ke Dili pada hari yang telah ditentukan untuk sidang. Dalam banyak hal, hal ini lebih disebabkan oleh pengadilan yang terlambat memberitahukan untuk membuat pengaturan yang perlu. Dalam prakteknya, para Hakim Penuntut sering harus mengadakan hubungan secara langsung dengan CIVPOL untuk memastikan agar transport diatur. Bahkan jika tanggung-jawab untuk melakukan hal serupa berada di pundak jaksa penuntut, salah seorang panitera pengadilan memikul tanggung-jawab mengkonfirmasi pengaturan tersebut dengan pihak-pihak tersebut sekurang-kurangnya 24 jam sebelum sidang sehingga waktu pengadilan yang sangat berarti tidak dibuang-buang.

Lagi pula, Panel Khusus sekarang ini tidak mempunyai perintah yang teratur di akhir setiap sidang dengar-pendapat pendahuluan kepada badan-badan berwenang penjara yang memberikan wewenang atau meminta kehadiran tersangka di penjara pada sidang berikutnya. Jika hal ini merupakan kasus seorang panitera pengadilan atau salah seorang staff di dalam administrasi pengadilan harus bertanggung-jawab memastikan bahwa perintah serupa dibuat, dan selanjutnya memastikan bahwa tembusan dari perintah tersebut diterima oleh pihak kepolisian, penjara atau pihak terkait lainnya. Orang yang sama harus juga berperan sebagai pjabat penghubung pengadilan dengan kepolisian dan penjara.

Masih ada juga sejumlah contoh terkait mengenai miskinnya komunikasi antara pengadilan dan CIVPOL/TLPS. Panel Khusus pernah menunda persidangan hanya karena makan siang dan tersangka, yang pada saat itu sedang dalam tahanan, dibiarkan sendiri di ruang pengadilan. Pada kesempatan lain, Panel Khusus menjatuhkan putusan bersalah dan mengumumkan bahwa hukuman penjara harus dilakukan dengan segera juga. Karena

---

<sup>39</sup> Lihat diskusi di bawah ini yang berkaitan dengan persidangan.

tersangka telah dibebaskan secara bersyarat selama persidangan, ia tidak berada di dalam tahanan salah seorang staff CIVPOL atau TLPS. Sidang berakhir dan semua orang meninggalkan ruang pendailan, membuat tersangka bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia juga meninggalkan pengadilan juga. CIVPOL segera menyadari apa yang telah terjadi dan mengirimkan para staff untuk mencari tahanan yang “melarikan diri”, yang akhirnya ditemukan sedang menunggu di rumahnya.<sup>40</sup>

### 3.2.2 *Manajemen Panel Khusus*

Walaupun Regulasi-regulasi UNTAET yang mendirikan Panel Khusus kelihatannya menggambarkan hadilnya panel-panel yang banyak untuk menyidangkan kasus-kasus kejahatan serius, fakta menunjukkan bahwa hanya satu Panel yang beroperasi sejak didirikan pada bulan Januari 2001 hingga pertengahan November 2001. Salah satu unsur penting dari Panel Khusus dan Pengadilan Tinggi ialah kenyataan bahwa dua badan pengadilan ini diisi oleh hakim-hakim internasional dan Timor Lorosa'e yang ditugaskan untuk menggelar pengadilan kasus-kasus kejahatan serius<sup>41</sup>. Walaupun selama berbulan-bulan ada rotasi dari pihak hakim internasional yang cukup untuk komposisi dua hakim internasional untuk kasus tertentu yang diberikan, hanya ada satu orang hakim Timor Lorosa'e yang ditunjuk untuk Panel Khusus yang pertama. Tidak hanya hakim ini tidak mempunyai waktu jedah antar sidang, sebagaimana didapat oleh para hakim internasionalnya, tetapi Panel ini tidak berfungsi pada saat ia sakit atau permintaan cuti lain.

Pengadilan Tinggi mengalami masalah yang sama ketika satu-satunya hakim Timor Lorosa'e di pengadilan ditunjuk sebagai salah seorang Komisioner Pemilihan Umum bagi pemilihan Umum Majelis Konstitusi pada 30 Agustus 2001<sup>42</sup>. Kepergiannya— lebih-lebih kurangnya perencanaan administrasi untuk menggantikannya - membuat Pengadilan Tinggi tidak dapat mendengarkan tuntutan naik banding selama dua minggu sehingga dua hakim Pengadilan Distrik Dili secara sementara diangkat sebagai “Hakim Sementara Pengadilan Tinggi”<sup>43</sup> - meskipun nyatanya pengangkatannya baru diumumkan beberapa minggu sebelum ia diminta untuk meninggalkan pengadilan dan bahwa sejumlah kasus telah dijadwalkan pada waktu itu.<sup>44</sup> Karena salah seorang hakim internasional pada Pengadilan Tinggi telah meninggalkan Timor Lorosa'e, Pengadilan tersebut sekarang tidak lagi menggelar pengadilan mengenai kasus-kasus kejahatan serius.

Masalah yang sama juga terus-menerus mengancam Panel Khusus. Sejak pengadilan Los Palos yang dimulai di awal bulan Juli 2001, semua kasus kejahatan serius yang lain belum dapat dilaksanakan karena sama sekali karena Panel kedua belum berfungsi. Walaupun telah ditentukan tanggal sidang dari sejumlah kasus, sidang dengar-pendapat pendahuluan juga mengalami penundaan sama halnya dengan keputusan mengenai kasus Los Palos. Lagipula kontrak dari salah seorang staff yang ikut menyidangkan kasus Los Palos hampir selesai dan

---

<sup>40</sup> *Public Prosecutor v Carlos Soares*, 15 Mei 2001.

<sup>41</sup> Mengenai Panel Khusus lihat bagian 22.1 dari Regulasi UNTAET 11/2000. Mengenai Pengadilan Tinggi lihat bagian 22.2 dari Regulasi UNTAET 15/2000.

<sup>42</sup> Walaupun Presiden Pengadilan Tinggi merupakan seorang yang beradal dari Timor Lorosa'e, ia seorang warga negara Portugal dan mendapatkan jabatan sebagai seorang staff internasional pada posisi tersebut untuk tujuan tuntutan-tuntutan Kejahatan Serius.

<sup>43</sup> Lihat Pengumuman 7 Juni 2001. Penugasan sementara hanya berlaku hingga 30 September 2001. Yang lebih anehnya ialah pengumuman tersebut menyatakan bahwa “Selama periode pengangkatan sementara ini, yang bersangkutan akan tetap melaksanakan pekerjaannya yang biasa di Pengadilan Distrik Dili dan akan berperan-serta sebagai Hakim Pengadilan Tinggi kalau ada kasus, jika dipanggil oleh Pengadilan Tinggi.”

<sup>44</sup> Jabatan Komisaris Pemilihan Umum yang dibayar tidak sesuai dengan kantor yudisial menurut bagian 2.4 dari Regulasi UNTAET 2000/11.

ia telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke negaranya. Kendatipun fakta menunjukkan bahwa hal seperti ini besar kemungkinan terjadi menjelang berakhirnya pengadilan, tidak ada langkah-langkah administratif yang ditempuh untuk menyikapi keadaan demikian. Para hakim, setelah mendapat banyak tekanan, secara murah hati tetap tinggal dan menyelesaikan kasus tersebut, tetapi hal ini tidak dapat diselesaikan oleh tantangan administratif yang terus-menerus ada.<sup>45</sup>

Lebih penting lagi ialah, ditutupnya kasus-kasus kejahatan serius lain berjalan lebih dari empat bulan telah menciptakan tertimbunnya kasus-kasus yang sangat banyak. Selama beberapa bulan Departemen Kehakiman telah memberi pertanda tentang didirikannya Panel Khusus kedua. Salah seorang hakim internasional dari Cabo Verde telah diangkat di bulan Juni 2001 untuk menggantikan hakim Italia yang pergi. Akan tetapi, antara bulan itu dan pertengahan November hakim ini hanya menggelar satu sidang dengar-pendapat pendahuluan dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Hakim internasional lain yang dipersiapkan untuk Panel Kedua sekarang masih bertugas sebagai Wakil Direktur Departemen Kehakiman tetapi sekarang telah bergabung dengan Panel Khusus Kedua. Salah seorang hakim Timor Lorosa'e pada Pengadilan Distrik Dili yang telah diangkat untuk sementara waktu pada Pengadilan Tinggi dan yang telah menyidangkan beberapa kasus naik-banding untuk kejahatan serius, diharapkan akan bergabung dengan Panel Khusus kedua tetapi tidak dapat melakukan hal serupa karena masalah kesehatan.<sup>46</sup> Walaupun pada 8 Oktober 2001 salah satu hakim Pengadilan Distrik diangkat lagi menggantikan posisinya, kasus-kasus yang telah dijadwalkan untuk disidangkan belum berjalan lebih dari satu bulan kemudian.

Salah satu kasus serupa telah ditunda untuk kesempatan tiga kali berturut-turut, dan dalam dua kesempatan tim penyelidik yang tiba di pengadilan dengan salah seorang saksi yang dibawa dengan helikopter dari suatu daerah jauh hanya untuk mendapat pemberitahuan bahwa panel kedua yang telah lama ditunggu itu belum siap<sup>47</sup>. Patut juga diperhatikan bahwa salah satu alasan yang disebutkan ialah kenyataan bahwa jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya masih terlibat di dalam pengadilan Los Palos, dan sebenarnya kurangnya jumlah jaksa penuntut umum merupakan salah satu masalah utama di dalam semua sistem pengadilan.<sup>48</sup> Sementara jadwal setiap *dengar-pendapat* pengadilan berubah secara tak terelakkan dari waktu ke waktu, hal perubahan yang biasa dan kurangnya komunikasi efektif dengan pihak-pihak terkait hanya menghabiskan waktu semua orang. Tak pandang bagian mana dari pengadilan yang lebih tepat bertanggungjawab mengorganisir panel-panel tersebut, jelas bahwa sistem pengadilan sekarang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan karena itu pengadilan sekarang sedang mengarah kepada penundaan serius yang semakin memburuk.

---

<sup>45</sup> Menurut bagian 19 dari Regulasi UNTAET 2000/11, tampaknya tidak mungkin bahwa pengadilan dapat mengangkat hakim pengganti sehingga hakim yang sedang dipertanyakan tetap setuju untuk tinggal. Yang lebih penting lagi ialah, hakim digantikan di dalam keadaan yang sulit karena fakta bahwa tidak ada perencanaan di dalam administrasi pengadilan untuk mencari hakim pengganti.

<sup>46</sup> Tidak jelas apakah pengangkatan hakim secara sementara pada Pengadilan Tinggi telah selesai masa kerjanya, yang memunculkan pertanyaan apakah ia akan menduduki juga posisi hakim pada pengadilan yang tingkatnya lebih rendah pada waktu yang bersamaan.

<sup>47</sup> *Public Prosecutor v Anigio de Oliveira* 7 November 2001.

<sup>48</sup> Frustrasi para hakim di dalam hal ini menjadi terkenal— dalam kasus terakhir ketika seorang jaksa penuntut umum meminta untuk diizinkan untuk mengikuti sidang pengadilan yang lain, salah seorang hakim berseru “Saya tidak akan menunda sidang ini hanya karena tidak berfungsinya sistem pengadilan!”

Pada tanggal 13 November 2001, salah seorang hakim Pengadilan Distrik Dili kembali ditugaskan pada Panel Khusus kedua dan persidangan yang pertama dari Panel kedua dimulai pada hari berikutnya. Walaupun Panel ini mendapatkan masalah menggigit lainnya yang dapat diterka sebelumnya, hal ini lebih banyak berkaitan dengan interpreter tambahan yang dibutuhkan oleh fakta bahwa para hakim yang bekerja pada panel ini menggunakan bahasa Portugis. Yang lebih memprihatinkan lagi ialah, fakta bahwa tingkap organisasi administrasi yang sekarang dan dukungan tidak memadai bagi suatu Panel. Agar dapat mengurus dua panel, perubahan yang mendasar harus dilakukan dengan segera.

***Rekomendasi 8: Bahwa administrasi pengadilan menugaskan salah seorang anggota staff sebagai Petugas Penghubung Pihak Berwenang Penjara dan Polisi dengan tanggung-jawab memastikan bahwa dokumen mengenai pemindahan seorang tahanan diatur sesuai dengan pemberitahuan yang cukup untuk menjamin kehadiran tersangka pada sidang yang telah direncanakan dan bahwa tahanan harus dibawa kembali ke pengadilan setelah dijatuhi hukuman.***

***Rekomendasi 9: Bahwa prosedur-prosedur untuk menata rencana kerja panel-panel khusus segera dikaji kembali dengan segera.***

***Rekomendasi 10: bahwa salah seorang panitera pengadilan ditugaskan sebagai pengelola daftar yang bekerja secara dekat dengan hakim dan bertanggung-jawab atas perubahan pada jadwal persidangan, termasuk menyampaikan perubahan tersebut kepada petugas penghubung penjara, pihak-pihak yang terlibat dan publik.***

### **3.3 Hak atas sidang dengar-pendapat umum**

Sebagai tambahan terhadap jaminan-jaminan yang disebutkan pada bagian terdahulu di atas, artikel 14(1) dari ICCPR juga menjamin hak untuk sidang dengar-pendapat umum.<sup>49</sup> Pada dasarnya, hak untuk sidang dengar-pendapat umum mengandung makna orang yang dijadikan tersangka mempunyai hak untuk diadili di depan publik, dan publik memiliki hak untuk menghadiri pengadilan tersebut. Hal ini merupakan salah satu unsur paling penting dari konsep suatu pengadilan yang adil karena hal itu merupakan “salah satu pelindung yang paling penting dari kejujuran dan independensi proses pengadilan, dan merupakan suatu sarana untuk melindungi kepercayaan publik pada sistem peradilan.”<sup>50</sup> Hak ini diakui di dalam prosedur hukum pidana transisi yang menyatakan bahwa sidang pengadilan terbuka untuk publik, termasuk dalam situasi-situasi yang mempertaruhkan keamanan nasional, pelanggaran seksual atau kepentingan keadilan.<sup>51</sup>

Akan tetapi, untuk memaknai hak mengikuti sidang dengar-pendapat umum, Komite HAM PBB telah mendeklarasikan bahwa pengadilan harus memberikan informasi mengenai waktu dan tempat dari sidang dengar-pendapat yang ada, dan menyediakan fasilitas yang memadai agar anggota-anggota yang tertarik dapat menghadiri sidang dengar-pendapat dan selanjutnya memungkinkan publik dan pers mengikuti sidang dengar-pendapat umum secara bebas.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat juga Artikel 10 dari Deklarasi Universal HAM; Artikel 6(1) dari Konvensi Eropa; Artikel 64(7) dan 67(1) dari Statuta ICC.

<sup>50</sup> Bab 14, Amnesty International *Fair Trials Manual*

<sup>51</sup> Bagian 28 dari Regulasi 2000/30; perkecualian yang sangat terbatas kepada sifat publik dari pengadilan sesuai dengan standar-standar internasional yang telah disebutkan di atas.

<sup>52</sup> *Van Meurs v the Netherlands* (215/1986) 13 Juli 1990, Laporan Komite HAM PBB, pada hlm. 60.

### **3.3.1 Akses publik ke persidangan**

Para hakim Panel Khusus telah menekankan berulang-ulang selama digelarnya pengadilan mengenai kasus-kasus kejahatan serius bahwa semua persidangannya terbuka untuk umum.<sup>53</sup> Akan tetapi, dalam pengadilan lebih penting pertama yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, para pemantau JSMP telah berulang-kali melihat masalah dengan CIVPOL dan Staff Keamanan Departemen Kehakiman yang tidak mengizinkan publik masuk ke dalam ruang pengadilan, termasuk keluarga tersangka dan juga pemantau hukum Timor Lorosa'e yang lain. Alasan yang diberikan pada saat itu ialah bahwa pihak-pihak ini tidak memiliki kartu identitas dari UNTAET. Pada hari pertama pengadilan, hal seperti ini terjadi terhadap kurang lebih dua puluh orang publik yang telah datang dengan tujuan mengikuti persidangan. Hakim yang memimpin persidangan berbicara secara langsung dengan pihak CIVPOL yang terlibat pada saat istirahat di pengadilan setelah sejumlah orang publik mendesaknya memperhatikan hal ini; tetapi masalah yang sama terjadi lagi pada hari-hari berikutnya menyusul pergantian dalam pihak keamanan. Sekali lagi, panitera pengadilan tidak memperhatikan masalah ini atau tidak melihat masalah ini sebagai bagian dari tugasnya sehingga menjadi lebih waspada mengenai masalah tersebut. Masalah ini sebagian timbul karena kenyataan bahwa Departemen Kehakiman sedang mendiami gedung yang sama dengan Panel Khusus, dan merupakan suatu kebiasaan bagi UNTAET atau departemen ETTA untuk meminta kartu pengenal dari para pengunjung. Akan tetapi, tak seorangpun di dalam administrasi pengadilan yang tampaknya telah menjelaskan hal itu kepada CIVPOL bahwa permintaan akan kartu pengenal tersebut sebenarnya tidak berlaku untuk pengadilan yang publik sifatnya.

### **3.3.2 Akses ke informasi mengenai sidang-sidang pengadilan**

Para pemantau JSMP sering hanya menjadi bagian para pemantau di dalam galeri umum ruang pengadilan. USAID telah mendanai televisi bersirkuit tertutup untuk menambah jumlah orang-orang yang ingin melihat sidang-sidang pengadilan di gedung Pengadilan Tinggi yang baru. Hal itu akan diterima dengan baik jika jumlah orang yang datang untuk melihat persidangan meminta televisi bersirkuit tertutup. Masalah selanjutnya ialah bahwa Panel Khusus untuk Kejahatan Serius hanya berdiam di Dili, yang berarti bahwa tidak mungkin bagi orang-orang dari daerah-daerah yang jauh di Timor Lorosa'e yang tertarik mengikuti persidangan tersebut, termasuk keluarga korban atau keluarga tersangka.

Masyarakat Timor Lorosa'e telah terus-menerus mengharapkan keadilan dalam kaitannya dengan pendudukan Indonesia. Dewasa ini dan untuk masa depan yang tidak terlalu jauh, upaya Panel Khusus merupakan satu-satunya mekanisme yudisial formal yang sekarang berusaha merespons berbagai peristiwa pada masa pendudukan tersebut. Lagi pula, dalam suatu Negara yang ditandai dengan suatu sistem hukum yang rapuh dan tidak efisien di bawah penjajahan dan pendudukan, ada kebutuhan akan kegiatan-kegiatan pengadilan yang diharapkan dapat menghadirkan aturan hukum yang harus dipublikasikan. Tetapi, ada semacam kekurangan informasi publik mengenai kegiatan-kegiatan pengadilan. Sifat publik pengadilan seharusnya dipublikasikan dan didorong. Administrasi pengadilan harus memikul tanggung-jawab serupa untuk mengatur kelompok pelajar atau kelompok publik yang lain melihat sidang-sidang pengadilan. Diberikannya informasi kepada publik mengenai pengadilan harus menjadi salah satu tugas utama dari administrasi pengadilan.

Kurangnya informasi umum diperparah lagi dengan kurangnya daftar informasi khusus mengenai kasus-kasus sekarang. Lebih dari 90 persen kasus-kasus kejahatan serius belum

---

<sup>53</sup> Hal ini biasanya berupa pengumuman pada awal diadakannya persidangan awal atau sidang pengadilan.

diumumkan kepada publik. Sulit, bahkan bagi berbagai pihak, untuk menentukan kapan suatu pengadilan akan digelar. Biasanya suatu pengumuman mengenai kasus seseorang dipajang di ruang pengadilan, tetapi hal ini sering dilakukan pada hari yang sama dengan dengan persidangan yang telah ditentukan. Pada minggu-minggu awal yang dimulai dengan tanggal 3 Juni 2001 sebuah pengumuman mengenai segala persidangan Kejahatan Serius untuk minggu itu dipajang di pintu masuk ruang pengadilan Distrik Dili, suatu hal yang pertama kali sejak para pemantau JSMP memulai pemantauan mengenai situasi tersebut. Akan tetapi sejak saat itu, daftar tersebut tidak pernah diperbaharui kembali secara teratur dan hal itu hanya dilakukan selama dua minggu sebelum hilang sama sekali. Di dalam gedung Pengadilan Tinggi tidak ada papan pengumuman untuk umum sama sekali mengenai Panel Khusus dan Pengadilan Tinggi. Ada sebuah papan gantung di luar ruang sidang Pengadilan Tinggi yang biasanya diisi dengan pengumuman-pengumuman yang berisi tentang tanggal persidangan mendatang, tetapi biasanya berisi pengumuman yang salah dan dikelilingi pengumuman dan Memorandum Departemen Kehakiman. Tak ada satu hal pun yang menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan orang banyak dipajang di tempat tersebut. Sesungguhnya, pada saat Panel Khusus pindah kantor dari Pengadilan Distrik Dili ke gedung ini, tidak ada tanda-tanda mengenai pemindahan tempat ini sama sekali. Persidangan yang sedianya dijadwalkan pada hari tertentu ditunda karena polisi telah membawa tersangka ke Pengadilan Distrik Dili – dan tiba di tempat itu dengan tidak menemukan Panel Khusus, mobil dari penjara biasanya kembali membawa tersangka ke penjara.

Para pemantau JSMP sering mengandalkan individu yang bertanya kepada para hakim, jaksa atau bahkan para penterjemah pengadilan untuk mengkonfirmasi waktu persidangan yang telah ditentukan. Lain dari metode bersifat sementara ini, belum ada sesuatu yang siap diberikan kepada publik biasa, sumber informasi resmi biasanya dipajang pada suatu papan putih dalam ruang penitara pengadilan setelah para panitera mencatat segala kegiatan persidangan Panel Khusus. Informasi-informasi resmi seperti ini jarang sekali diperbaharui, dalam hal tertentu, kantor panitera pengadilan tersebut sering dikunci atau tidak ada orang yang ada di dalamnya karena panitera pengadilan sering berada di tempat persidangan. Sulit untuk memahami mengapa tugas dasar administrasi pengadilan belum berfungsi setelah berbulan-bulan didirikan. Kurangnya sistem pengumpulan dan pemberian informasi yang sederhana mengenai persidangan pengadilan berdampak langsung pada sejauh mana Panel Khusus dapat digambarkan sebagai suatu panel yang melakukan kegiatannya secara publik.

### **3.3.3 Akses publik ke dokumen-dokumen pengadilan**

Aspek lain dari memberikan informasi kepada publik mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh Panel Khusus ialah mengizinkan publik mengakses sejumlah dokumen mendasar tertentu, lebih-lebih dakwaan, perintah pengadilan, dan keputusan pengadilan. Sama halnya dengan daftar informasi, sangat sulit untuk mengakses dokumen-dokumen pengadilan bersifat publik ini. Sementara sejumlah dokumen dapat saja disembunyikan dari akses publik, seperti pernyataan tersangka atau saksi, dan informasi pribadi atau yang berkenaan dengan pra-peradilan lain mengenai tertuduh atau saksi, dokumen yang hanya boleh beredar di kalangan pengadilan, kantor-kantor pencatatan di dalam yurisdiksi yang berbeda dapat menyikapi masalah ini dengan suatu sistem yang diawasi atau dilarang untuk akses publik. Tetapi, tidak ada satu pun keputusan mengenai kebijakan yang tampaknya telah dibuat mengenai hal ini. Staff pengadilan, termasuk hakim, memberikan jawaban yang berlawanan terhadap permintaan mengenai dokumen-dokumen pengadilan yang harus disampaikan kepada publik.

Kurangnya siap akses terhadap dokumen-dokumen dapat juga memiliki implikasi mengenai hak untuk mendapatkan waktu cukup dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan sebagaimana dijamin oleh Artikel 14(3)(b) dari ICCPR, jika sistem untuk meninjau arsip-arsip pengadilan itu tidak memadai.<sup>54</sup>

*“Merupakan tanggung-jawab badan-badan berwenang yang kompeten untuk memastikan bahwa para pengacara mendapat akses ke arsip-arsip informasi dan dokumen yang layak mereka miliki dan kuasai sesuai dengan waktu yang cukup guna memungkinkan para pengacara secara efektif memberikan bantuan hukum kepada klien mereka. Akses serupa sudah harus disediakan pada saat-saat awal yang tepat.”*<sup>55</sup>

Salah satu masalah terkait lainnya ialah kemampuan pihak-pihak yang ada untuk memiliki akses kepada arsip pengadilan otoritatif guna memastikan kelengkapan dokumen-dokumen mereka sendiri (suatu pekerjaan yang sangat dibutuhkan, khususnya mengingat bahwa tiadanya suatu administrasi pembelaan yang efektif, dan sering tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang dihasilkan), dihambat oleh kurangnya prosedur-prosedur administrasi untuk melakukan hal serupa.

Dewasa ini dokumen-dokumen asli pengadilan diperkirakan disimpan dalam sebuah lemari di kantor pendaftaran. Tidak ada informasi publik mengenai prosedur apapun yang dapat digunakan oleh publik untuk mendapatkan arsip-arsip pengadilan atau mendapatkan salinan dokumen-dokumen tersebut. Seperti telah digambarkan di atas, kantor pendaftaran lebih sering tidak ditunggu oleh orang dan tidak ada ruang untuk publik. Lagi pula, hingga Juni 2001 ketika Panel Khusus pindah ke Pengadilan Tinggi, bagian pendaftaran tidak lagi memiliki mesin fotokopi. Untuk mendapatkan salinan dari dokumen-dokumen pengadilan di Pengadilan Distrik Dili, staff pengadilan biasanya menyampaikan permintaan kepada kantor CIVPOL yang tidak jauh dari tempat itu, yang hanya akan memberikan akses kepada mesin fotokopi tetapi bukan pasokan kertas.

### **3.3.4 Penerbitan keputusan pengadilan**

Hak untuk mendapatkan sidang dengar-pendapat publik juga mencakup penerbitan keputusan-keputusan pengadilan yang dihasilkan dari kasus-kasus. Sebenarnya, aspek akses publik ini bahkan lebih luas dari sekedar berkaitan dengan dengar-pendapat itu sendiri; artikel 14(1) dari ICCPR menyatakan bahwa satu-satunya perkecualian dalam mempublikasikan keputusan pengadilan ialah jika melibatkan kepentingan anak-anak atau sengketa keluarga.<sup>56</sup> Walaupun keputusan pengadilan dianggap telah dibuat pada saat secara lisan disampaikan atau dipublikasikan, mengingat bahwa masalah-masalah yang dirincikan di atas berkaitan erat dengan tiadanya informasi umum dan akses ke persidangan pengadilan, diragukan apakah sistem “publikasi” yang sekarang efektif: faktor yang menentukan ialah apakah keputusan pengadilan dapat diakses oleh semua orang.<sup>57</sup>

Pentingnya untuk dapat mengakses keputusan-keputusan pengadilan secara publik di dalam kasus-kasus Kejahatan Serius tidak boleh diremehkan. Peranan krusial kasus-kasus

---

<sup>54</sup> Lihat juga Artikel 6(3)(b) dari Konvensi Eropa; Artikel 8(2)(c) dari Konvensi Amerika dan Artikel 67 dari Statuta ICC. Kupasan lebih jauh dari hak ini berada di luar jangkauan laporan ini, selain ada kaitannya dengan kurangnya prosedur pendaftaran untuk mendapatkan akses ke dokumen-dokumen pengadilan.

<sup>55</sup> Prinsip 21, Prinsip Dasar PBB mengenai Peranan Para Pengacara (1990).

<sup>56</sup> Lihat juga Komentar Umum Komite HAM PBB 13, paragraf 4.

<sup>57</sup> *Curne v Jamaica* (377/1989) 29 Maret 1994, Laporan Komite HAM PBB, vol II (A/49/40) 1994 hlm. 73.



Kejahatan Serius terhadap upaya rekonsiliasi yang lebih luas di Timor Lorosa'e telah digambarkan di atas. Lagi pula, keputusan-keputusan Panel Khusus memberikan kontribusi yang penting bagi yurisprudensi internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kasus-kasus serupa lainnya. Bagi masyarakat Timor Lorosa'e, dan khususnya bagi komunitas hukum Timor Lorosa'e, keputusan-keputusan awal seperti ini memberikan suatu pandangan yang menawan ke dalam pembangunan sistem hukum. Demikian juga, sebagaimana hakim-hakim internasional pada Panel Khusus lebih sering diganti secara teratur dan hakim Timor Lorosa'e diangkat, sangat penting bahwa kumpulan keputusan-keputusan pengadilan yang terorganisir ditata dengan baik.

Di samping alasan-alasan ini, masih belum ada juga sistem publikasi keputusan-keputusan pengadilan.<sup>58</sup> Walaupun keputusan-keputusan pengadilan sering dibaca secara publik di pengadilan, administrasi pengadilan tidak mempersiapkan salinan putusan pengadilan yang penting sebelumnya sehingga masyarakat atau pers mendapatkan salinan keputusan tersebut untuk tujuan laporan yang akurat atau kajian lebih lanjut. Lembaran-lembaran keputusan pengadilan sementara ini disimpan di dalam sebuah map di kantor Register Pengadilan dari pada di kantor Pencatatan Panel Khusus, yang selanjutnya memiliki dampak lebih pada tiadanya suatu titik kontak publik dalam administrasi pengadilan bagi kasus-kasus kejahatan serius. Pada saat yang bersamaan staff pengadilan tampaknya bingung apakah harus mengeluarkan salinan dari keputusan-keputusan tersebut dan bahkan menyampaikan permintaan tersebut kepada hakim.<sup>59</sup>

Walaupun masalah mengenai bahasa dan terjemahan akan disampaikan dalam bagian-bagian selanjutnya, perlu disebutkan sejumlah masalah yang berkaitan dengan publikasi keputusan-keputusan Panel Khusus. Segala keputusan panel Khusus hingga hari ini dibaca secara publik di pengadilan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, oleh salah seorang hakim internasional dan salah seorang hakim Timor Lorosa'e secara bergantian. Keputusan tertulis sering memberi catatan bahwa teks versi bahasa Inggris merupakan teks otoritatif. Tetapi, akses ke salinan keputusan versi bahasa Indonesia lebih sering sangat sulit daripada versi Inggris yang "asli". Mengingat versi bahasa Indonesia merupakan versi yang sangat dimengerti oleh masyarakat Timor Lorosa'e, dan tentu saja mereka yang berprofesi hukum, penting untuk memberikan prioritas yang sama bagi penerbitan dokumen-dokumen keputusan yang diterjemahkan.

Keadaan ini bahkan lebih parah pada tingkat Pengadilan Tinggi. Keputusan-keputusan Kejahatan Serius yang terkini belum diterjemahkan sama sekali dari naskah asli. Banyak gagasan ditulis dalam bahasa Portugis, terkadang memiliki gagasan yang sedikit di dalam bahasa Inggris, dan versi bahasa Indonesia bahkan belum dikeluarkan kepada publik<sup>60</sup>. Walaupun sejumlah rangkuman terbatas telah disampaikan di ruang pengadilan dalam

---

<sup>58</sup> Putusan pengadilan Panel Khusus pertama sejauh ini dibacakan di dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dengan menyatakan bahwa teks Inggris yang merupakan teks otoritatif. Pemahaman yang kritis mengenai hal ini dituntut dari para penterjemah pada saat mereka diminta untuk membacakan keputusan pengadilan akan tetapi terkadang ditunda karena para penterjemah belum mempunyai waktu yang cukup untuk menterjemahkan dokumen yang ada.

<sup>59</sup> JSMP menerbitkan keputusan dan dakwaan serupa bila dapat diperoleh dalam bentuk elektronik di dalam websitenya ([www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)). Jumlah orang Timor Lorosa'e yang mendapatkan akses internet sangat sedikit. Tetapi yang lebih penting lagi ialah, tidak menyenangkan untuk mengatur suatu pekerjaan ORNOP independent tertentu yang mendapatkan dokumen-dokumen pengadilan merupakan suatu hal yang nyata.

<sup>60</sup> Salah seorang hakim Pengadilan Tinggi terus-menerus ditempatkan di dalam situasi yang tidak menyenangkan karena tidak ada fasilitas terjemahan yang tersedia untuk mengalih-bahasakan rancangan alasan keputusan rekannya, selain kenyataan bahwa ia tidak memahami bahasa Portugis, yang perlu menyampaikan pendapatnya yang berbeda di dalam bahasa Inggris di dalam setiap kasus.

bahasa Tetun, hal ini tidak dapat menggantikan terjemahan yang lengkap dan teliti dari keputusan pengadilan<sup>61</sup>. Dalam suatu Negara yang memiliki banyak bahasa dan pengadilan yang memiliki beberapa bahasa resmi, praktek seperti ini tidak dapat diterima. Organisasi-organisasi hukum Timor Lorosa'e telah berulang-kali mengeluh kepada JSMP perlunya keputusan-keputusan Kejahatan Serius disediakan dalam bahasa Indonesia. Semua keputusan pengadilan harus diterjemahkan secara lengkap baik secara lisan maupun secara tertulis agar dapat memenuhi tuntutan untuk mengakses yang merupakan bagian dari hak mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat publik.

***Rekomendasi 11: Bahwa manajer bidang pembuatan berita acara atau salah seorang pegawai pengadilan diberi tugas untuk mempersiapkan suatu jadwal terbaru dan menempelkan jadwal tersebut di luar gedung pengadilan, dan di tempat-tempat umum, serta diterbitkan melalui jaringan media lokal termasuk radio sesegera mungkin.***

***Rekomendasi 12: Bahwa administrasi pengadilan menerbitkan suatu kebijakan pengadilan yang jelas mengenai dokumen-dokumen pengadilan yang dapat diberikan kepada publik dan cara-cara untuk mendapatkan atau menyalin dokumen tersebut. Kebijakan ini harus memastikan bahwa kantor pencatatan diisi oleh staff antara jam-jam tertentu dan menetapkan apakah untuk mendapatkan atau menyalin dokumen-dokumen tersebut harus membayar.***

***Rekomendasi 13: Serangkaian laporan pengadilan yang berisi keputusan-keputusan Panel Khusus seharusnya diterbitkan dan disebarakan kepada semua pengadilan di Timor Lorosa'e, dan disediakan kepada para praktisi hukum serta masyarakat luas melalui kantor Pencatatan Panel Khusus.***

***Rekomendasi 14: Semua keputusan pengadilan seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kasus-kasus penting seharusnya memiliki ringkasan pendek yang dapat dipersiapkan kepada pers dan publik.***

### **3.4 Hak untuk memeriksa para saksi**

ICCPR menjamin bahwa dalam menentukan suatu hukuman pidana, seorang terdakwa berhak "untuk memeriksa, atau setelah pemeriksaan, saksi-saksi yang memberatkan pihaknya dan untuk mendapatkan kehadiran dan pemeriksaan para saksi atas namanya dalam situasi yang sama jika para saksi memberatkan dia."<sup>62</sup> Tentu tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa hak ini diakui dan dihargai oleh Panel Khusus. Akan tetapi, JSMP telah memantau hambatan-hambatan berarti dalam penerapan praktisnya.

Walaupun bagian 52.3 dari Regulasi UNTAET 2000/30 menyatakan ganti-rugi terhadap pengeluaran para saksi, masalah administrasi mengenai menggantikan biaya yang telah digunakan oleh para saksi merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam kasus-kasus Kejahatan Serius. Wajar, dan dalam konteks Timor Lorosa'e menjadi sangat penting, bahwa pengeluaran para saksi ditanggung oleh pengadilan. Sebagai seorang saksi, seorang individu memberikan suatu jasa kepada pengadilan, dan karena itu pengeluaran mereka ditanggung pengadilan. Saksi dalam persidangan Kejahatan Serius terdapat di seluruh Timor Lorosa'e. Kebanyakan dari para saksi adalah petani dan pihak-pihak lainnya yang kehidupannya lebih

---

<sup>61</sup> Dalam suatu peristiwa belum lama berselang, dua orang penterjemah pengadilan hadir di dalam ruang pengadilan akan tetapi hakim yang memimpin persidang memutuskan untuk tidak menggunakan jasa terjemahan mereka.

<sup>62</sup> Artikel 14(3)(e) dari ICCPR. Lihat juga Artikel 6(3)(d) dari Konvensi Eropa; Artikel 8(2)(f) dari Konvensi Amerika; dan Artikel 67(1)(e) dari Statuta ICC.

sengsaran pada saat mereka harus mengadakan perjalanan selama beberapa hari ke Dili dan memberikan kesaksian. Disebutkan, semua saksi tersebut telah dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang telah membayarkan pengeluaran individu para saksi dan kemudian mencari ganti-rugi Departemen Kehakiman. Tetapi, penundaan yang sangat panjang dan ketidak-jelasan administrasi telah membuat upaya ganti rugi serupa tak kunjung tiba. JSMP memahami bahwa salah satu alasan tampaknya disebabkan oleh perencanaan dalam anggaran pengadilan untuk pengeluaran serupa. Dalam keadaan seperti ini, pencarian dana segera dilakukan dari donor bilateral tanpa harus menunggu lebih lama lagi.

Walaupun para jaksa internasional pada Unit Kejahatan Serius barangkali dapat menunggu ganti-rugi untuk pengeluaran para saksi, pada umumnya jaksa penuntut umum Timor Lorosa'e tidak. Kenyataan bahwa tiadanya dukungan administrasi pengadilan dalam kaitannya dengan para saksi dapat juga memperparah masalah-masalah yang ada selama ini sehingga tidak ada saksi meringankan yang dipanggil oleh Kejahatan Serius hingga hari ini.

***Rekomendasi 15: Bahwa perlu disediakan anggaran pengadilan untuk pengeluaran para saksi dan bahwa Administrator Pengadilan menerapkan suatu sistem untuk mengatur pembayaran akan permintaan tersebut.***

### **3.5 Hak untuk menyatakan naik-banding**

Salah satu upaya perlindungan yang penting mengenai peradilan yang adil ialah hak untuk menyatakan naik-banding guna memastikan kejelian keputusan pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diakui di dalam Artikel 14(5) dari ICCPR yang menyatakan bahwa “semua orang yang dihukum harus berhak menerima hukumannya dan hukuman tersebut perlu ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum”.<sup>63</sup> Sementara UNTAET telah menciptakan Pengadilan Tinggi, untuk sidang naik-banding masing-masing Pengadilan Distrik termasuk dari Panel Khusus, kurangnya dokumen pengadilan yang akurat dan komprehensif yang menjadi landasan dari upaya naik-banding tampaknya meremehkan hak yang satu ini.

Transkrip persidangan sangat penting bagi para hakim dan pihak-pihak lain untuk mengkaji ulang bukti dan argumen yang disampaikan di pengadilan, baik bagi tujuan pengadilan itu sendiri maupun lebih khusus lagi ialah untuk meminta naik-banding. Jika penalaran atau hasil keputusan pengadilan negeri tersebut ditantang, transkrip yang akurat merupakan dasar pertama yang digunakan pengadilan tinggi untuk menilai tantangan tersebut.

Hasil transkrip pengadilan benar-benar menuntut sumber-daya yang sangat penting dan dalam situasi yang berlaku di Timor Lorosa'e kurangnya sumber-daya memadai akan tetap merupakan tantangan berarti untuk beberapa tahun mendatang. Tetapi, di dalam merancang sistem pengadilan di Timor Lorosa'e UNTAET menyadari pentingnya aspek khusus dari administrasi pengadilan ini. Bagian 26.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 menyatakan bahwa:

*Pengadilan harus memastikan bahwa, dalam setiap persidangan yang dilakukan seorang hakim atau panel para hakim, dokumen tertulis atau yang direkam dari*

---

<sup>63</sup> Lihat juga Artikel 2 dari Protokol 7 dari *Konvensi Eropa*; Artikel 8(2)(h) dari *Konvensi Amerika*.

*persidangan harus dilakukan dan disediakan, bilamana dibutuhkan, kepada semua pihak demi persidangan-persidangan, termasuk kepada penasehat hukumnya.*<sup>64</sup>

Hal ini dielaborasi lebih jauh oleh *Transitional Rules of Criminal Procedure* (Aturan-aturan Transisi Tindak Pidana) yang menyatakan bahwa:

*Pengadilan harus mencatat semua persidangan. Dokumen itu meliputi:*

*(a) waktu, tanggal dan tempat persidangan;*

*(b) identitas dari para hakim, pihak-pihak, saksi, ahli dan penterjemah, jika ada;*

*(c) notulen singkat, catatan stenografi atau rekaman audio mengenai persidangan.*

*Media yang meliput dapat digunakan bila perlu dalam persidangan selanjutnya untuk menghasilkan transkripsi dan jika tidak memfasilitasi fungsi dari pihak-pihak yang melakukan kajian ulang. Catatan media harus disimpan sampai*

*(i) enam bulan menyusul selesainya atau berakhirnya masa menyatakan naik-banding; atau*

*(ii) enam bulan menyusul dilepaskannya terdakwa secara lengkap dari batasan pasca-peradilan;*

*(d) jika pengadilan memerintah untuk melakukan demikian atau pihak-pihak meminta mendokumentasikannya; dan*

*(e) keputusan pengadilan dan, dalam hal menjatuhkan hukuman, sanksi.*<sup>65</sup>

Tetapi, sumber-daya yang dituntut untuk menerapkan dua ketentuan ini secara lengkap belum pernah disediakan dan hingga sekarang tidak ada transkripsi resmi mengenai salah satu kasus kejahatan serius yang telah dihasilkan oleh pengadilan. Sementara ketentuan mengenai pencatatan terkadang memenuhi bagian ini, hal ini juga memiliki masalahnya tersendiri<sup>66</sup>. Walaupun demikian, penting dan rumitnya kasus-kasus kejahatan serius yang ditangani Panel Khusus masih menjamin dokumen-dokumen yang ditranskripsikan secara layak. Dalam enam bulan pengoperasian Panel Khusus, semua kasus disidangkan di ruang persidangan utama di Pengadilan Distrik Dili yang tidak memiliki fasilitas untuk mendokumentasikan jenis persidangan apapun. Sebagaimana telah digambarkan pada bagian sebelumnya pada laporan ini, seorang panitera pengadilan seharusnya hadir pada saat persidangan Panel Khusus, apakah itu selama persidangan awal, pengadilan, pengaturan hukuman atau pemberian keputusan tertulis. Tetapi, panitera pengadilan hanya dapat membuat tulisan tangan yang sangat terbatas mengenai persidangan dan sering hanya hadir sementara saja selama persidangan berlangsung.<sup>67</sup>

Untuk membandingkan keadaan ini, salah seorang hakim Panel Khusus secara terpaksa telah menulis semua notulensi persidangan di dalam komputer portablenya. Walaupun seorang hakim telah ditunjuk sebagai Hakim Pelapor untuk setiap kasus, kenyataannya pembuatan notulensi ini hanya dilakukan oleh satu orang hakim yang juga merupakan salah seorang juru-ketik yang sangat mahir, walaupun hakim ini lebih sering merupakan Hakim yang

---

<sup>64</sup> Bagian 26.1 dari Regulasi UNTAET 2000/11 seperti diamandemenkan oleh Regulasi 2001/25. Menariknya, versi asli dari ketentuan ini hanya digunakan sebagai referensi transkripsi. Kelihatannya bukan suatu kebetulan bahwa amandemen itu mempertimbangkan keadaan Panel Khusus yang telah berubah, barangkali sama seperti menggambarkan suatu pandangan yang lebih realistik mengenai apa yang dapat diterapkan untuk seluruh sistem pengadilan.

<sup>65</sup> Bagian 31 dari Regulasi UNTAET 2000/30.

<sup>66</sup> Perlu diketahui bahwa gedung Pengadilan Distrik Dili tidak memiliki generator pada saat Dili masih sering mengalami pemadaman listrik, sehingga rekaman atau transkripsi dalam bentuk apapun juga akan membutuhkan sumber listrik alternatif.

<sup>67</sup> Para pemantau JSMP telah mengamati banyak sekali persidangan yang di dalamnya tidak ada panitera sama sekali.

memimpin persidangan pada Panel Khusus dan dengan demikian berulang-ulang berhenti guna mengajukan pertanyaan atau memimpin persidangan.

JSMP melihat bahwa telah ada peningkatan yang sangat terbatas dalam beberapa bulan terakhir. Panel Khusus telah pindah ke gedung Pengadilan Tinggi pada saat mulai menyidangkan kasus pertama kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>68</sup> Dalam mempersiapkan kasus ini, suatu sistem rekaman video dipasang di dalam ruang pengadilan yang baru direhab dan telah berfungsi untuk hampir semua sesi persidangan telah mengulur enam puluh hari selama lebih dari waktu empat bulan. Lagi pula, sistem perekaman audio sedang dipakai untuk menyimpan rekaman tersebut ke dalam CD (*compact disc*). Tetapi, Panel Khusus pertama tetap meneruskan laku penulisan notulensi karena kaset video dan CD hanya didokumentasikan dengan tanggal tanpa memberikan indikasi mengenai tahap khusus persidangan yang terkandung di dalamnya. Pada tahap ini, akan sangat sulit bagi sebuah pengadilan tinggi untuk menemukan suatu bagian khusus dari rekaman tersebut guna ditinjau ulang. Apalagi, kerumitan rekaman audio dari terjemahan yang sangat banyak tidak dapat diremehkan.

Situasi seperti ini telah menjadi sumber frustrasi yang terus berlangsung baik bagi para hakim dan berbagai pihak yang muncul di depan Panel Khusus, mengingat komentar berikut yang disertakan sebagai bagian keputusan yang diterbitkan mengenai kasus *The Prosecutor v Joseph Leki*:

*“Pengadilan telah memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa catatan sidang dengar-pendapat harus disediakan oleh hakim pelapor, mengingat bahwa tidak ada perangkat rekaman audio maupun video, tidak ada stenografer serta tiadanya penulis notulen singkat yang disediakan oleh pengadilan di Timor Lorosa’e. Hakim pelapor membuat catatan setelah dengan seakurat mungkin pada sebuah computer portable pernyataan dan pertanyaan yang dibuat oleh kedua belah-pihak, perintah dan keputusan hakim selama sidang dengar-pendapat.”<sup>69</sup>*

Komentar serupa di atas telah menjadi suatu hal yang biasa di dalam pengadilan Panel Khusus untuk Kejahatan Serius.<sup>70</sup> Demikian juga, implikasi serius kurangnya catatan pengadilan yang akurat dan komprehensif telah menjadi bahan keprihatinan, setidaknya salah seorang hakim Pengadilan Tinggi, dalam tuntutan naik-banding akhir yang pertama terhadap keputusan Panel Khusus. Walaupun tuntutannya merupakan pendapat yang minoritas, Hakim Frederick Egonda-Ntende menemukan bahwa dokumen resmi mengenai sidang pengadilan tidak sama dengan laporan keputusan Panel Khusus, dengan memperhatikan bahwa “bahasa yang tidak persis membuat dokumen itu agak membingungkan”.<sup>71</sup> Ia akhirnya menemukan bahwa kurangnya kejelasan baik di dalam keputusan pengadilan dan dokumen pengadilan – yang merupakan bukti andalan untuk melakukan naik-banding – membuatnya menyimpulkan bahwa keputusan Panel Khusus tidak berdasarkan hukum dan karena itu harus dibatalkan. Pentingnya dokumen pengadilan

---

<sup>68</sup> Kasus ‘Los Palos’ yang dimulai pada awal Juli 2001, tidak lama setelah Panel Khusus pindah.

<sup>69</sup> *Public Prosecutor v Joseph Leki*, Kasus No 05/2000, 11 Juni 2001.

<sup>70</sup> Lihat juga *Public Prosecutor v Carlos Soares* Kasus No 12/2000, 31 Mei 2001; *Public Prosecutor v Francisco dos Santos Laku* Kasus No 8/2000, 25 Juli 2001. Komentar serupa dibuat secara lisan oleh Hakim Dolzany da Costa (pemimpin sidang) selama pengadilan *Public Prosecutor v Manuel Gonsalves Leto Bere* Kasus No 10/2000 20 April 2000.

<sup>71</sup> *Joaq Fernandes v Prosecutor General Naik-banding Pidana* 2/2001, 29 Juni 2001, Pilihan yang Berbeda dari Hakim Egonda Ntende. Lihat juga diskusi mengenai keputusan ini dalam Suzannah Linton, “Prosecuting Atrocities at the District Court of Dili” (2001) 2 *Melbourne Journal of International Law* 301 pada hlm. 318-323.

dalam kasus-kasus kejahatan serius menjadi lebih parah lagi setelah Presiden Pengadilan Tinggi menekankan perintah secara lisan bahwa para hakim tidak diizinkan mempertanyakan masalah hukum selama persidangan naik-banding.<sup>72</sup>

Selain itu, para pembela umum dan jaksa juga telah melaporkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengajukan naik-banding sejumlah kasus karena kurangnya transkripsi dan telah menyatakan keenganan mereka guna memproses lebih jauh lagi kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang rumit jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Dalam situasi baru yang di dalamnya para hakim, jaksa dan pembela menerapkan perangkat hukum rumit baru dari latar-belakang dan pengalaman yang berbeda, dalam pengadilan yang tampak baru dimulai setiap hari, sangat penting untuk melakukan suatu kajian ulang yang transparan. Tanpa dokumen persidangan pengadilan yang mendetail dan jelas, hak untuk menyatakan naik-banding hanya akan semakin tidak berarti.

***Rekomendasi 16: Bahwa suatu bagian transkripsi pengadilan disediakan segera, dengan staff dan perlengkapan yang cukup untuk bekerja. Jika perlengkapan rekaman di Pengadilan Tinggi dipakai, suatu posisi perlu diciptakan untuk seseorang yang diberi tanggung-jawab untuk menggunakan dan merawat perlengkapan tersebut.***

### **3.6 Hak atas seorang interpreter**

Salah satu isu terpenting yang telah membuntuti administrasi Panel Khusus untuk Kejahatan Serius ialah interpretasi dan penterjemahan. Artikel 14(3)(a) dari ICCPR menjamin bahwa di dalam menuntaskan suatu tuduhan pidana seorang terdakwa berhak untuk diberitahu dengan cepat dan mendetail dalam bahasa yang biasa dipahaminya dan sebab dari dakwaan yang dituduhkan terhadapnya.<sup>73</sup> Hak ini menuntut bahwa informasi dari pengadilan dan Jaksa harus diterjemahkan; apakah terjemahan itu secara lisan atau tertulis tergantung pada cara informasi itu sedianya disampaikan. Ini berarti, misalnya, terjemahan dakwaan harus disampaikan dalam bentuk tulisan. Artikel 14(3)(f) dari ICCPR menegaskan bahwa semua orang yang dikenakan hukuman pidana memiliki hak atas seorang interpreter jika ia tidak memahami atau berbicara bahasa yang dipakai di dalam pengadilan. Hal ini tercermin di dalam Bagian dari Regulasi UNTAET No. 2000/11 yang menyatakan bahwa:

*Pengadilan harus menyediakan jasa penterjemahan dan interpretasi dalam setiap kasus yang merupakan bagian dari persidangan, atau seorang hakim, atau seorang saksi atau ahli saksi tidak secara tepat memahami bahasa yang digunakan di pengadilan tersebut.*

Tetapi, dalam prakteknya ada banyak masalah yang memberi kesan bahwa hak ini hanya dihayati secara nominal saja.

#### **3.6.1 Kebutuhan bahasa di dalam kasus-kasus Panel Khusus**

Dalam pengadilan di Timor Lorosa'e dewasa ini terdapat empat bahasa resmi: Tetun, Indonesia, Portugis dan Inggris.<sup>74</sup> Kebutuhan Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili mencerminkan realitas multi-bahasa ini dari sistem pengadilan baru lainnya di Timor Lorosa'e. Para Jaksa Kejahatan Serius dan staffnya berasal dari berbagai bangsa tetapi tidak

---

<sup>72</sup> Lihat hlm. 17 dari keputusan Hakim Egonda Ntende.

<sup>73</sup> Lihat juga Artikel 6(3)(e) dari Konvensi Eropa; Artikel 8(2)(a) dari Konvensi Amerika dan Artikel 67(1)(f) dari Statuta ICC.

<sup>74</sup> Bagian 35 dari Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diamandemen oleh Regulasi 2001/25.

mempergunakan bahasa Inggris secara meluas apalagi jika bukan bahasa resmi mereka. Bahasa para pembela umum pertama-tama ialah bahasa Indonesia, walaupun para penasehat internasional mereka hingga hari ini pada umumnya masih tetap menggunakan bahasa Inggris.<sup>75</sup> Sama halnya dengan mayoritas pengacara Timor Lorosa'e yang mendapat pendidikan di Indonesia, satu-satunya jaksa Timor Lorosa'e pada Panel Khusus menggunakan bahasa Indonesia, atau jika perlu, Tetun, walaupun ia merupakan salah satu dari orang-orang di dalam pengadilan yang mampu berbicara dalam empat bahasa pengadilan tersebut. Tiga hakim internasional yang bertugas pada Panel Khusus pertama hingga hari ini masih tetap menggunakan bahasa Inggris, walaupun dua orang dari mereka dapat berbicara bahasa Portugis. Para hakim internasional dalam Panel Khusus kedua menggunakan bahasa Portugis. Tak seorang pun hakim internasional yang dapat berbicara Indonesia atau Tetun. Sampai hari ini, semua kasus Panel Khusus telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Portugis dan bahasa Indonesia sebagai dua bahasa utama, dengan terjemahan secara sementara dalam Tetun sejumlah bahasa Timor Lorosa'e yang lainnya jika perlu.

Karena bahasa pemerintahan transisi kedua ialah Portugis, dan tampaknya semakin jelas akan menjadi bahasa resmi Timor Lorosa'e, ada upaya pemaksaan dari Departemen Kehakiman untuk mendorong digunakannya bahasa ini di dalam sistem pengadilan. Ini tentu tidak mengurangi kebutuhan untuk tetap menyediakan fasilitas interpretasi yang cukup. Mayoritas terdakwa yang muncul di depan Pengadilan, para saksi dan publik yang menghadiri persidangan lebih sering berbicara Tetun dan bahasa Indonesia, walaupun dalam banyak kesempatan para terdakwa dan saksi berbicara bahasa pribumi lain selain Tetun.<sup>76</sup> Lagi pula, sejumlah ahli hukum senior Timor Lorosa'e menekankan lembaga peradilan Timor Lorosa'e perlu untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dan Tetun selama kurang lebih satu dekade: "Pengadilan tidak ingin mengambil risiko menggunakan suatu bahasa yang tidak dipahami oleh mayoritas masyarakat Timor Lorosa'e".<sup>77</sup>

### 3.6.2 *Kekurangan interpreter/penterjemah*

Untuk menjawab kebutuhan linguistik yang rumit, Departemen Kehakiman hanya memiliki enam orang penterjemah/interpreter; seorang penterjemah Tetun-bahasa Indonesia-Inggris, tiga orang penterjemah bahasa Indonesia-Inggris, dan dua orang penterjemah Portugis-bahasa Indonesia. Selain merujuk pada regulasi di atas, pengadilan masih belum dapat menyediakan para interpreter dalam bahasa-bahasa Timor Lorosa'e lainnya pada sidang-sidang pengadilan. Hingga kini, ketika para interpreter tersebut diminta untuk disediakan oleh Jaksa Pembela Umum muncullah sejumlah pertanyaan mengenai imparialitas. Tak seorang pun dari penterjemah/interpreter Departemen ini secara eksklusif ditugaskan pada Panel Khusus atau bahkan pada pengadilan, tetapi mereka bekerja pada berbagai bidang di Departemen Kehakiman. Hanya seorang penterjemah yang berlatar-belakang hukum dan tak seorangpun yang mengikuti pelatihan formal mengenai penterjemahan. Tanggung-jawab mereka sering berada di luar hanya menterjemahkan untuk sidang-sidang pengadilan. Mereka juga dituntut untuk menterjemahkan sejumlah dokumen pengadilan (termasuk keputusan pengadilan), surat-menyurat di dalam departemen dan pengadilan, dan membuat interpretasi pada saat pertemuan antara staff Departemen Kehakiman dengan para

<sup>75</sup> Salah seorang penasehat internasional berbicara Portugis, tapi sejumlah pembela umum melaporkan mengalami kesulitan berkomunikasi dengannya secara efektif. Seorang mantan Portugis melaporkan lebih mudah menggunakan Inggris daripada Portugis untuk komunikasi profesional dengan para pembela umum.

<sup>76</sup> Contoh yang dilihat termasuk para penutur Fataluku, Makasae, Bunak.

<sup>77</sup> Lihat misalnya "Pengadilan akan tetap menggunakan bahasa Indonesia dan Tetun" *Timor Post* 6 September 2001 hlm.3.

narapidana. JSMP memahami bahwa delapan orang penterjemah/interpreter disediakan oleh Australian Volunteers International pada Departemen Kehakiman antara bulan Mei dan Desember 2000; tetapi, sebagian besar dari mereka tidak diganti ketika kontrak mereka berakhir.

Kekurangan penterjemah/interpreter yang akut berarti hanya satu bagian dari pekerjaan penterjemahan yang dibutuhkan yang pernah dilakukan. Para penterjemah memperkirakan bahwa perlu ditambahkan tujuh penterjemah lagi untuk sekedar melaksanakan beban kerja yang sekarang. Sejumlah masalah yang telah muncul dalam kaitannya dengan terjemahan putusan pengadilan, terutama pada Pengadilan Tinggi, telah disinggung di atas.

Walaupun jumlah staff yang sekarang telah menawarkan untuk memiliki seorang rekan kerja Timor Lorosa'e untuk "melindungi" mereka, karena itu belajar pada saat bekerja merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk mahir dalam bahasa-bahasa lainnya, tawaran ini belum diindahkan administrasi pengadilan. Lagi pula, ada koordinasi yang sangat sedikit dalam kaitannya dengan prioritas sektor dan mereka lebih sering membagi kerja di antara mereka sendiri. Kekurangan struktur administrasi ini berarti bahwa belum ada seorang yang bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa para penterjemah memiliki sumber-daya yang memadai, seperti pelatihan yang dikhususkan di bidang peristilahan Kejahatan Serius, kamus hukum dan perlengkapan lainnya.

Selanjutnya, jumlah interpreter untuk pengadilan benar-benar tidak cukup, khususnya mengingat bahwa keadaan yang sedang berlaku merupakan penyakit yang biasa di Timor Lorosa'e. Pada salah satu sidang dengar-pendapat para pemantau JSMP melihat bahwa satu-satunya penterjemah yang ada sangat sakit tetapi terus bekerja karena kekurangan interpreter yang akut. Interpreter tersebut begitu sakit sehingga ia lebih sering meminta waktu untuk istirahat, tetapi pada saat tertentu ia meminta istirahat untuk beberapa menit sebelum para hakim menyadari bahwa mereka berbicara dalam bahasa Inggris dan karena itu tidak mendengarkan interpretasi.

### **3.6.3 Dampak pada sidang pengadilan**

Di dalam pengadilan, hambatan itu jelas. Satu orang sering harus menterjemahkan selama berjam-jam tanpa istirahat karena tidak ada lagi orang lain untuk menggantikannya. Secara khusus masalah ini terasa parah dalam kaitannya dengan penterjemahan dari bahasa Tetun-Inggris. Ketika seorang penterjemah Tetun-Inggris sedang cuti, dua penterjemah bahasa Tetun-Indonesia duduk bersama dengan para saksi dan terdakwa serta secara serentak membisikkan terjemahan bahasa Tetun sementara terjemahan yang resmi dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Tidak hanya celoteh tiada henti selagi para jaksa dan hakim berbicara (dalam bahasa Inggris), tetapi keluarga korban dan saksi, demikian juga media setempat yang hadir, tidak dapat mendengarkan terjemahan Tetun.

Pada kesempatan lain ketika tidak ada seorang penterjemah Tetun-Inggris dan para saksi yang ada hanya berbicara bahasa Tetun, hakim yang memimpin persidangan tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus mengikuti sistem yang rumit dan sangat lama untuk masing-masing pertanyaan/jawaban: hakim akan menanyakan segala pertanyaan dari terdakwa dalam bahasa Inggris (demi kepentingan para Jaksa Internasional), dan kemudian mengulangnya pertanyaan tersebut dalam bahasa Portugis. Penterjemah A (yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris) menterjemahkan pertanyaan tersebut dari bahasa Portugis ke dalam bahasa Tetun. Setelah mendengarkan jawaban terdakwa (dalam Tetun), penterjemah A kemudian menterjemahkan jawaban tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Penterjemah B



(yang tidak dapat berbicara Tetun) kemudian menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Demikian juga, jaksa penuntut umum yang menanyakan hal serupa di dalam bahasa Tetun, dan mengulanginya dalam bahasa Indonesia, harus menunggu penterjemah B menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, dan kemudian berpaling kepada terdakwa untuk mendengarkan jawabannya di dalam bahasa Tetun. Penterjemah A selanjutnya menterjemahkan jawabannya kembali ke dalam bahasa Indonesia sehingga penterjemah B dapat menterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ketika jaksa, yang hanya dapat berbicara bahasa Inggris dari empat bahasa yang ada, menanyakan suatu pertanyaan maka ada lagi sejumlah langkah yang dilibatkan. Ia menyampaikan pertanyaan dalam bahasa Inggris, yang kemudian oleh penterjemah B disampaikan di dalam bahasa Indonesia. Penterjemah A menterjemahkannya ke dalam bahasa Tetun, dan jawaban dari terdakwa kembali melalui proses yang sama.<sup>78</sup>

Hampir semua orang di dalam ruang pengadilan memiliki kesulitan dalam mengikuti diskusi. Dalam sejumlah peristiwa kebingungan menyebabkan pengulangan pertanyaan/jawaban, dan apa yang semula hanya merupakan ujian lisan yang sangat pendek dan tanpa tedeng aling-alang kemudian berubah menjadi proses pengadilan yang sangat lama, tidak terhitung dengan para saksi yang sedang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa traumatis seperti melihat keluarganya dibunuh milisi dan harus menjawab pertanyaan yang sama selama beberapa kali.

Seringkali pada terdakwa tidak jelas-jelas memiliki masalah dalam memahami pertanyaan para hakim walaupun tidak jelas apakah hal ini disebabkan oleh terjemahan yang tidak jelas atau karena cara menyusun pertanyaan. Masalah-masalah terbesar muncul ketika para hakim mencoba memastikan apakah hak pra-peradilan para terdakwa dihormati, apakah memahami hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan apakah ia berniat untuk menyatakan bersalah. Dalam keadaan seperti ini, pengenalan akan konsep-konsep hukum sangat penting dalam menterjemahkan istilah-istilah hukum dengan teliti. Hanya seorang penterjemah yang mendapatkan pelatihan di bidang hukum, dan ia baru bekerja secara penuh pada Departemen Kehakiman pada tanggal 1 November 2001; karena beberapa bulan sebelumnya ia hanya “dipinjamkan” pada Departemen Kehakiman dari Departemen ETTA lainnya yang bekerja *part-time* dan tampaknya tidak menentu. Ada kebutuhan yang mendesak bagi para penterjemah yang memiliki latar-belakang di bidang hukum, khususnya di bidang sistem hukum Indonesia dan hukum pidana internasional dan hukum HAM. Salah satu contoh belakangan ini terjadi dalam menterjemahkan kata “*premeditated*” ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan harafiah dari “*premeditated murder*” atau “pembunuhan yang direncanakan terlebih dulu” ialah “pembunuhan yang direncanakan sebelumnya”. Di dalam bahasa Inggris, keadaan mental dari pra-meditasi merupakan suatu unsur kejahatan pembunuhan yang tidak harus menuntut seseorang “merencanakannya”. Kurangnya kesadaran para penterjemah akan perbedaan yang sangat halus ini dapat mengarah kepada salah paham dalam menterjemahkan kesaksian terdakwa. Jawaban terdakwa terhadap pertanyaan jaksa dan hakim tentang apakah pembunuhan yang telah diakui direncanakan sebelumnya, sama halnya dengan memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah ia “telah merencanakan” pembunuhan itu atau tidak, yang dalam hal tertentu tersangka mengkaliam bahwa ia tidak merencanakannya, ia tetap saja mengatakan bahwa TNI yang “merencanakan”, walaupun ia mengakui bahwa ia yang membunuh korban.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Public Prosecutor v Carlos Soares* 8 Mei 2001

<sup>79</sup> *Public Prosecutor v Jose Valente* 2 Mei 2001.

Permasalahan mengenai kurangnya kejelasan dalam tukar-menukar informasi di pengadilan karena kesulitan bahasa, menjadi lebih parah ketika pengadilan mengadopsi praktek mengenai penambahan terhadap hal-hal yang memberatkan lainnya dalam keputusan pengadilan guna mendapatkan kutipan terdakwa, seperti terjadi di dalam keputusan Leki yang mana kredibilitas terdakwa diragukan karena inkonsistensi yang sangat kentara di dalam memberikan kesaksian tentang apakah ia memiliki senjata atau tidak pada tanggal 25 September 1999 malam.<sup>80</sup> Kemungkinan itu tidak dapat dihitung karena inkonsistensi yang dituduhkan melulu berkaitan dengan hasil kesulitan bahasa di antara para peserta di pengadilan.

Pada tingkat umum, tampaknya pelatihan yang kurang cukup kepada semua pihak mengenai penggunaan interpreter secara wajar, untuk memastikan bahwa semua terjemahan tersebut seakurat mungkin. Hampir semua pihak cenderung berbicara selama ber menit-menit, sering menggunakan bahasa hukum atau fakta yang rumit, dari pada berbicara dalam kalimat-kalimat yang padat dan jelas. Para hakim mencoba mengingatkan pihak-pihak di pengadilan mengenai hal ini, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa sejumlah bahan yang sederhana itu tidak pernah diterjemahkan. Satu masalah yang kerap-kali terjadi ialah ketika berlangsung komunikasi informal antara dua pelaku pengadilan yang sama-sama berbicara bahasa yang sama. Ada banyak kasus di mana diskusi yang panjang antara para jaksa dan hakim tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun Tetun. Seringkali juga hal ini berkaitan dengan masalah-masalah kecil mengenai prosedur pengadilan, seperti mengatur waktu untuk mengarsipkan dokumen-dokumen, atau bagaimana menyidangkan kasus-kasus tersebut, tetapi media, orang banyak dan terdakwa tidak mengerti bahan yang sedang didiskusikan. Demikian juga, terdakwa lebih sering berbicara kepada kepada saksi dalam bahasa Tetun tanpa terjemahan yang lengkap dalam bahasa Inggris. Tidak lazim bagi para penterjemah untuk memaksa menghentikan diskusi demikian, dengan meminta izin untuk menterjemahkan.

Selanjutnya, sebagian besar pelaku pengadilan jatuh dalam perangkap menggunakan penterjemah sebagai peserta yang aktif di dalam persidangan-persidangan, dari pada sebagai perantara pasif. Misalnya, seorang hakim atau jaksa dapat saja meminta seorang penterjemah untuk menanyakan sesuatu kepada terdakwa, dari pada langsung menanyakan pertanyaan kepada tertuduh. Akibatnya, penterjemah sering menjawab, "Ia mengatakan bahwa ...." dari pada melaporkan jawabannya secara langsung dalam menggunakan kata ganti orang pertama. Sementara para penterjemah terkadang melakukan hal ini secara disengaja untuk menghindari kebingungan mengenai kata-kata yang sedang diterjemahkan, dalam konteks kenyataan lisan dalam pengadilan pidana serius serupa, pentingnya untuk mendengarkan secara seksama dengan tepat apa yang dikatakan tidak boleh disepelekan.

#### **3.6.4 Penterjemahan yang simultan**

Fasilitas penterjemahan simultan yang dimiliki selama ini telah disambut sebagai suatu perkembangan di dalam ruang pengadilan Panel Khusus. Kebanyakan dari masalah yang dirujuk pada paragraf sebelumnya, yang berkenaan dengan penggunaan interpreter, telah berkurang karena para penterjemah sekarang berada di ruangan yang berbeda. Tetapi, penterjemahan yang simultan merupakan suatu keterampilan sangat berkembang dan membutuhkan pelatihan khusus, dan para penterjemah selama ini tidak mendapatkan pelatihan apapun dalam menggunakan fasilitas. Selanjutnya, merupakan suatu latihan yang benar-benar melelahkan bagi para penterjemah dan menuntut pergantian staff teratur,

---

<sup>80</sup> *Public Prosecutor v Joseph Leki*, Kasus No. 05/2000, 11 Juni 2001, penemuan factual terdapat di hlm. 4-7.

apalagi hambatan lain ialah terbatasnya jumlah penterjemah di departemen tersebut. Dalam artian tertentu, fasilitas penterjemahan hanya terdapat di dalam dua ruangan di gedung Pengadilan Tinggi. Jika Panel Khusus juga menggunakan ruangan tersebut pada saat yang sama dalam menggelar persidangan salah satunya tidak akan mendapatkan akses ke sistem baru tersebut.

***Rekomendasi 17:*** *Bahwa sedikitnya empat orang penterjemah/ interpreter tambahan yang cakap dalam kombinasi empat bahasa pengadilan direkrut oleh Departemen Kehakiman. Paling kurang empat orang ini ditugaskan secara khusus bekerja pada Panel Khusus untuk Kejahatan Serius. Masing-masing penterjemah diberi tugas pada suatu bidang administrasi yang memiliki tanggung-jawab utama guna memastikan bahwa para penterjemah memiliki dukungan yang dibutuhkan.*

***Rekomendasi 18:*** *Bahwa pengadilan membuat suatu daftar penterjemah yang mahir dalam bahasa-bahasa regional di Timor Lorosa'e yang dapat digunakan secara sementara jika diperlukan.*

***Rekomendasi 19:*** *Bahwa semua peserta pengadilan dilatih mengenai cara menggunakan penterjemah di pengadilan.*

#### 4 SIMPULAN

Dalam rentang waktu dua tahun silam, Timor Lorosa'e telah mengikuti suatu perjalanan yang panjang. Dari puing-puing infrastruktur yang dihancurkan secara total dan suatu masyarakat yang traumatis, ada sejumlah persidangan di gedung pengadilan yang direhab dan keputusan pengadilan yang meretas jalan hukum yang baru dinyatakan. Demikian juga, sejumlah kasus kecil yang berkenaan dengan tindak kekerasan yang memporak-porandakan negeri ini ketika Indonesia menarik diri disidangkan. Selanjutnya, sebuah konstitusi sedang dirancang guna meletakkan pegangan pembangunan jangka panjang dari institusi negara, termasuk struktur sistem pengadilan dan peradilan.

Mandat UNTAET bukan hanya untuk memerintah negeri yang sedang bersiap-siap untuk merdeka ini; yang lebih penting ialah, menciptakan struktur-struktur dan membangun kemampuan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintahan sendiri dari masyarakat Timor Lorosa'e. Sistem peradilan transisi yang dijalankan sekarang, dalam banyak hal akan dibawa ke dalam sistem mendatang tertentu. Dalam tahap proses transisi selanjutnya, akan lebih penting untuk melakukan penilaian yang seksama mengenai aspek mana yang perlu dipertahankan, dan aspek mana yang perlu dikesampingkan. Perlu diperhatikan bahwa di dalam kesigapan mengisi kekosongan lembaga peradilan di Timor Lorosa'e pada penghujung pendudukan Indonesia, UNTAET telah mengangkat para hakim, jaksa, pembela sebelum pihak-pihak ini memiliki yurisdiksi tertentu untuk dilaksanakan, gedung pengadilan untuk melaksanakan tugas, dan administrasi pengadilan tertentu. Para hakim sekarang memiliki yurisdiksi untuk melakukan pekerjaan dan gedung pengadilan, dalam hal tiga Pengadilan Distrik. Akan tetapi penekanan dari aspek-aspek sistem peradilan ini telah menghasilkan komitmen lembaga yang kurang berkelanjutan terhadap pembangunan administrasi pengadilan yang berfungsi.

Laporan ini mencoba mengetengahkan sejumlah panduan berkenaan dengan satu aspek krusial sistem pengadilan. Suatu sistem pengadilan yang baik pada dasarnya tidak mesti kelihatan – bila suatu sistem pengadilan dijalankan dengan mulus, administrasi pengadilan itu telah melaksanakan fungsinya dengan layak. Satu ciri yang mengkhawatirkan dari sistem

pengadilan ialah bahwa kurangnya pemahaman mengenai tuntutan administrasi pengadilan, sebagaimana tampak sekali dalam tiadanya komitmen anggaran institusi dan peran serta tanggung-jawab staff pengadilan yang didefinisikan secara jelas.

Timor Lorosa'e merupakan suatu negeri yang kecil yang dapat dilayani oleh suatu sistem peradilan yang relatif kecil dan efektif dengan dukungan dari administras pengadilan yang efisien. Sementara tidak dapat dipungkiri bahwa sumber-daya yang terbatas akan senantiasa menjadi tantangan signifikan, sumber-daya tidak dapat menyelesaikan masalah jika struktur-struktur yang direncanakan dengan baik dan sistem-sistem yang diterapkan para staff terlatih penuh untuk mengatur, mengalokasikan dan menggunakan sumber-daya tersebut. Berbagai masalah yang disampaikan di atas tampaknya disebabkan oleh kurang jelasnya pendelegasian tanggung-jawab untuk berbagai aspek manajemen pengadilan. Para pemantau JSMP melihat bahwa berulang-kali masalah-masalah tersebut muncul, walaupun ditangani secara sementara oleh para staff pengadilan, termasuk para hakim, gagal untuk menyentuh sumber masalah. Penyelesaian serupa hanya dapat dicapai melalui suatu pendekatan terkoordinir, dan bahwa harus dikomunikasikan secara efektif dengan pihak-pihak yang akan menerapkan kebijakan dan prosedur-prosedur tersebut. Para staff harus dipekerjakan dan dilatih sesuai dengan kebutuhan fungsional administrasi pengadilan, diberi tanggung-jawab yang digariskan secara jelas sehingga mampu merespons kebutuhan suatu administrasi efektif, dan diberi perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Temuan-temuan dalam laporan ini mendesak kajian ulang yang urgen di bidang struktur-struktur administrasi sehingga mendukung Panel Khusus untuk Kejahatan Serius, bahwa Panel Khusus diberi tingkat dukungan material dan pribadi yang digunakan guna melakukan pekerjaan mereka yang sulit, dan peningkatan yang berarti di dalam kebutuhan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sangatlah dibutuhkan. Untuk merangkum rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan di dalam laporan ini: perencanaan strategis yang komprehensif, yang didasarkan pada suatu analisa kebutuhan lengkap, seharusnya menjadi suatu prioritas. Hal ini akan mengarah kepada perubahan mendasar dalam administrasi pengadilan, termasuk mobilisasi sumber-daya yang diperbaiki secara signifikan dan pelatihan yang terkoordinir serta menyediakan penasehat bagi para staff Timor Lorosa'e. Implikasi dari upaya untuk tidak mengindahkan temuan-temuan ini sangat serius, walaupun pemerintahan transisi dan pemimpin Timor Lorosa'e telah menyatakan komitmen yang kuat untuk melindungi HAM, di dalam praktek sistem peradilan sedang mengarah penuh risiko untuk jatuh di bawah standar-standar minimum internasional. Peradilan yang baru secara keseluruhan, dan khususnya Panel Khusus untuk Kejahatan Serius, harus mampu memegang teguh standar-standar tersebut jika ingin mendapatkan kepercayaan publik yang dibutuhkan suatu masyarakat yang menyandarkan diri pada aturan hukum.

UNTAET – dan tidak lama lagi pemerintahan Timor Lorosa'e yang pertama – telah dihadapkan pada kesempatan yang jarang untuk melakukan upaya-upaya terbaik guna “membereskan” situasi yang dihadapinya di tahun 1999 dengan membangun paktek-praktek yang terbaik dalam sistem peradilan. Tahap kedua dan terakhir pemerintahan transisi harus menggunakan kesempatan yang masih tersisa sebelum segala permasalahan menjadi parah dan dengan demikian menjadi lebih sulit untuk diubah.

**LAMPIRAN A****SERIOUS CRIMES CASES MONITORED BY JSMP**

<b>Case #</b>	<b>Case name</b>	<b>Hearing date</b>	<b>Type of hearing</b>
1/2000	Joao Fernandes	25/06/01	Appeal
2/2000	Julio Fernandes	01/03/01	Decision
2/2000	Julio Fernandes	25/06/01	Preliminary appeal hearing
2/2000	Julio Fernandes	29/10/01	Appeal decision
5/2000	Yoseph Leki	18/05/01	Trial
5/2000	Yoseph Leki	22/05/01	Trial
5/2000	Yoseph Leki	29/05/01	Disposition
5/2000	Yoseph Leki	11/06/01	Decision
6/2000	Benjamin Sarmiento	22/05/01	Preliminary hearing
7/2000	Augustino da Costa	27/04/01	Preliminary hearing
7/2000	Augustino da Costa	21/06/01	Trial
7/2000	Augustino da Costa	28/06/01	Trial
7/2000	Augustino da Costa	16/07/01	Disposition
7/2000	Augustino da Costa	10/05/01	Preliminary hearing
8/2000	Mateus Tilman	29/05/01	Trial
8/2000	Mateus Tilman	06/06/01	Trial
8/2000	Mateus Tilman	13/06/01	Trial
8/2000	Mateus Tilman	16/06/01	Disposition
8/2000	Mateus Tilman	24/08/01	Decision
9/2000	Los Palos	16/02/01	Preliminary hearing
9/2000	Los Palos	03/05/01	Preliminary hearing
9/2000	Los Palos	27/04/01	Preliminary hearing
9/2000	Los Palos	17/05/01	Preliminary hearing
9/2000	Los Palos	06/03/01	Preliminary hearing
9/2000	Los Palos	9/07/01 - 8/11/01 (inclusive)	Trial
10/2000	Manuel Gonsales Bere	14/02/01	Preliminary hearing
10/2000	Manuel Gonsales Bere	19/04/01	Trial
10/2000	Manuel Gonsales Bere	20/04/01	Trial
10/2000	Manuel Gonsales Bere	24/04/01	Disposition
10/2000	Manuel Gonsales Bere	15/05/01	Decision
11/2000	Leonardus Kasa	14/02/01	Preliminary hearing
11/2000	Leonardus Kasa	26/04 /01	
11/2000	Leonardus Kasa	09/05/01	(Interim decision)
12/2000	Carlos Soares	16/02/01	Preliminary hearing
12/2000	Carlos Soares	24/04/01	Trial
12/2000	Carlos Soares	15/05/01	Disposition
12/2000	Carlos Soares	31/05/01	Decision
12/2000	Carlos Soares	08/05/01	Trial
12/2000	Carlos Soares	11/05/01	Trial
1/2001	Francisco Pedro	02/04/01	Preliminary hearing

1/2001	Francisco Pedro	04/05/01	Preliminary hearing
1/2001	Francisco Pedro	18/04/01	Preliminary hearing
1/2001	Francisco Pedro	23/05/01	Interim decision
1/2001	Francisco Pedro	11/05/01	Preliminary hearing
2/2001	Augusto Tavares	06/07/01	Disposition
2/2001	Augusto Tavares	15/06/01	Trial
2/2001	Augusto Tavares	28/09/01	Decision
2/2001	Augusto Tavares	12/06/01	Trial
3/2001	Jose Valente	02/05/01	Preliminary hearing
3/2001	Jose Valente	26/04/01	Preliminary hearing
3/2001	Jose Valente	16/05/01	Trial
3/2001	Jose Valente	23/05/01	Trial
3/2001	Jose Valente	30/05/01	Disposition
3/2001	Jose Valente	19/06/01	Decision
4/2001	Lolotoe	03/04/01	Preliminary hearing
4/2001	Lolotoe	27/04/01	Preliminary hearing
4/2001	Lolotoe	05/07/01	Preliminary hearing
4/2001	Lolotoe	06/04/01	Preliminary hearing
4/2001	Lolotoe	28/06/01	Detention appeal
4/2001	Lolotoe	07/06/01	Preliminary hearing
5/2001	Gaspar Leite	04/06/01	Preliminary hearing
5/2001	Gaspar Leite	24/05/01	Preliminary hearing
5/2001	Gaspar Leite	31/05/01	Preliminary hearing
6/2001	Augusto dos Santos	13/06/01	Preliminary hearing
7/2001	Anigio de Oliveira	02/05/01	Preliminary hearing
7/2001	Anigio de Oliveira	15/05/01	Preliminary hearing
7/2001	Anigio de Oliveira	23/05/01	Preliminary hearing
7/2001	Anigio de Oliveira	14/11/01	Trial
7/2001	Anigio de Oliveira	15/11/01	Trial
8/2001	Francisco dos Santos Laku	30/05/01	Trial
8/2001	Francisco dos Santos Laku	06/06/01	Trial
8/2001	Francisco dos Santos Laku	13/06/01	Disposition
8/2001	Francisco dos Santos Laku	25/07/01	Decision
8/2001	Francisco dos Santos Laku	09/05/01	Preliminary hearing
10/2001	Lino de Carvalho Ruben Monteiro Ruben Tavares	15/05/01	Preliminary hearing
10/2001	Lino De Carvalho etc	29/10/01	Interlocutory appeal decision
12/2001	Sergio da Costa	5/07/01	Preliminary hearing

## LAMPIRAN B

### RINGKASAN REKOMENDASI

#### *Administrasi Pengadilan pada umumnya*

**Rekomendasi 1:** Bahwa struktur administrasi Panel Khusus untuk Kejahatan Serious harus dipantau dan diteliti, termasuk mempertimbangkan apakah suatu struktur administrasi yang berbeda akan menjadi lebih efektif.

**Rekomendasi 2:** Bahwa Presiden Pengadilan Tinggi, setiap Administrator Hakim dan Administrator Pengadilan bersama-sama melakukan penilaian yang sistematis mengenai kebutuhan-kebutuhan administrasi, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pelatihan lebih lanjut bagi staff, dan wilayah tanggung-jawab.

**Rekomendasi 3:** Bahwa program pelatihan menyeluruh yang dikhususkan di bidang administrasi pengadilan diberikan kepada para panitera pengadilan demikian juga halnya kepada Administrator Hakim sebagai bagian dari program pelatihan yudisial.

#### *Sumber-daya yudisial*

**Rekomendasi 4:** Bahwa satu orang panitera internasional atau asisten peneliti dengan pengetahuan yang khusus di bidang hukum pidana internasional harus direkrut bagi setiap hakim pada Panel Khusus dan Pengadilan Tinggi sebagai suatu hal yang mendesak.

**Rekomendasi 5:** Bahwa akses ke internet disediakan di ruang kerja para hakim Panel Khusus secepat mungkin.

**Rekomendasi 6:** Bahwa suatu posisi yang tetap bagi seorang pustakawan Timor Lorosa'e di pengadilan diciptakan dan diisi secepatnya. Orang ini harus memiliki tanggung-jawab atas administrasi anggaran perpustakaan, menyediakan sejumlah majalah dan buku yang relevan, dan mendapatkan pelatihan yang dikhususkan dalam keterampilan perpustakaan hukum. Idealnya, pembangunan kapasitas ini berlangsung di dalam Timor Lorosa'e oleh seorang pustakawan pengadilan internasional berpengalaman yang disediakan oleh UNDP atau negara donor atau ORNOP yang lain selama kurang lebih tiga bulan.

**Rekomendasi 7:** Bahwa salah seorang panitera pengadilan Panel Khusus ditugaskan bertanggung-jawab untuk menciptakan hubungan yang dekat dengan para hakim mengenai kebutuhan sumber-daya umum yang terus-menerus dan mobilisasi sumber-daya melalui seorang Koordinator Penghubung Donor.

#### *Hak untuk mendapatkan pengadilan tanpa penundaan yang tak wajar*

**Rekomendasi 8:** Bahwa administrasi pengadilan menugaskan salah seorang anggota staff sebagai Petugas Penghubung Pihak Berwenang Penjara dan Polisi dengan tanggung-jawab memastikan bahwa dokumen mengenai pemindahan seorang tahanan diatur sesuai dengan pemberitahuan yang cukup untuk menjamin kehadiran tersangka pada sidang yang telah direncanakan dan bahwa tahanan harus dibawa kembali ke pengadilan setelah dijatuhi hukuman.

**Rekomendasi 9:** Bahwa prosedur-prosedur untuk menata rencana kerja panel-panel khusus segera dikaji kembali dengan segera.

**Rekomendasi 10:** bahwa salah seorang panitera pengadilan ditugaskan sebagai pengelola daftar yang bekerja secara dekat dengan hakim dan bertanggung-jawab atas perubahan pada jadwal persidangan, termasuk menyampaikan perubahan tersebut kepada petugas penghubung penjara, pihak-pihak yang terlibat dan publik.

#### *Hak atas dengar-pendapat publik*

**Rekomendasi 11:** Bahwa manajer bidang pembuatan berita acara atau salah seorang pegawai pengadilan diberi tugas untuk mempersiapkan suatu jadwal terbaru dan menempelkan jadwal tersebut di luar gedung pengadilan, dan di tempat-tempat umum, serta diterbitkan melalui jaringan media lokal termasuk radio sesegera mungkin.

**Rekomendasi 12:** Bahwa administrasi pengadilan menerbitkan suatu kebijakan pengadilan yang jelas mengenai dokumen-dokumen pengadilan yang dapat diberikan kepada publik dan cara-cara untuk mendapatkan atau menyalin dokumen tersebut. Kebijakan ini harus memastikan bahwa kantor pencatatan diisi oleh staff antara jam-jam tertentu dan menetapkan apakah untuk mendapatkan atau menyalin dokumen-dokumen tersebut harus membayar.

**Rekomendasi 13:** Serangkaian laporan pengadilan yang berisi keputusan-keputusan Panel Khusus seharusnya diterbitkan dan disebarakan kepada semua pengadilan di Timor Lorosa'e, dan disediakan kepada para praktisi hukum serta masyarakat luas melalui kantor Pencatatan Panel Khusus.

**Rekomendasi 14:** Semua keputusan pengadilan seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kasus-kasus penting seharusnya memiliki ringkasan pendek yang dapat dipersiapkan kepada pers dan publik.

#### *Hak untuk memeriksa para saksi*

**Rekomendasi 15:** Bahwa perlu disediakan anggaran pengadilan untuk pengeluaran para saksi dan bahwa Administrator Pengadilan menerapkan suatu sistem untuk mengatur pembayaran akan permintaan tersebut.

#### *Hak untuk naik-banding*

**Rekomendasi 16:** Bahwa suatu bagian transkripsi pengadilan disediakan segera, dengan staff dan perlengkapan yang cukup untuk bekerja. Jika perlengkapan rekaman di Pengadilan Tinggi dipakai, suatu posisi perlu diciptakan untuk seseorang yang diberi tanggung-jawab untuk menggunakan dan merawat perlengkapan tersebut.

#### *Hak untuk mendapatkan seorang interpreter*

**Rekomendasi 17:** Bahwa sedikitnya empat orang penterjemah/ interpreter tambahan yang cakap dalam kombinasi empat bahasa pengadilan direkrut oleh Departemen Kehakiman. Paling kurang empat orang ini ditugaskan secara khusus bekerja pada Panel Khusus untuk Kejahatan Serius. Masing-masing penterjemah diberi tugas pada suatu bidang administrasi yang memiliki tanggung-jawab utama guna memastikan bahwa para penterjemah memiliki dukungan yang dibutuhkan.

**Rekomendasi 18:** Bahwa pengadilan membuat suatu daftar penterjemah yang mahir dalam bahasa-bahasa regional di Timor Lorosa'e yang dapat digunakan secara sementara jika diperlukan.

**Rekomendasi 19:** Bahwa semua peserta pengadilan dilatih mengenai cara menggunakan penterjemah di pengadilan.